



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang klasifikasi kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu untuk disesuaikan dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peralihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikro Film atau Media lainnya dan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB II PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 2

Pola Klasifikasi Kearsipan dalam Peraturan Bupati ini digunakan sebagai Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi materi kode-kode dalam bentuk numerik yang mewakili pokok masalah, sub masalah dan sub-sub masalah bidang tugas Pemerintah Kabupaten.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 86 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN POLA KLASIFIKASI
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP

PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

A. PENDAHULUAN

Tujuan kearsipan antara lain adalah menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pengendalian arsip yang berdaya guna dan berhasil guna dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang terkandung di dalam arsip.

Salah satu sub sistem dari sistem pengendalian dimaksud ialah mengklasifikasikan arsip yang artinya memisahkan arsip atas dasar perbedaan yang ada yang merupakan dasar untuk penataan arsip secara sistematis dan efektif, agar memudahkan penemuan kembali arsip sehingga pelayanan penyajian informasi kepada pimpinan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Mengingat fungsi arsip sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok bagi organisasi, penyusunan pola klasifikasi arsip diarahkan dalam rangka kegunaannya bagi kepentingan petugas arsip maupun pimpinan yang memakainya.

Dengan demikian prinsip pola klasifikasi kearsipan yang diterapkan akan memberikan gambaran hierarki pelaksanaan tugas yang jelas yang berguna dalam pengendalian dan penemuan kembali arsip sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

B. BENTUK DAN SUSUNAN

1. Pola Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Kabupaten Cilacap merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pola klasifikasi kearsipan diperinci secara desimal dengan menggunakan Tiga Angka Dasar.
2. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan 3 (tiga) perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
3. Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini, terlebih dahulu dibedakan antara tugas substantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang).
4. Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800 dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif diluar masalah pengawasan,

kepegawaian dan keuangan. Di samping itu, juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti protokol, urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok lainnya seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara dan daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya. Dengan demikian maka kesepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kesepuluh pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut :

000 U m u m

100 Pemerintahan

200 Politik

300 Keamanan dan Ketertiban

400 Kesejahteraan Rakyat

500 Perekonomian

600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan

700 Pengawasan

800 Kepegawaian

900 Keuangan

5. Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang terkandung dalam arsip dan dipandang sebagai alat penentu di mana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan. Kode ini juga menunjukkan adanya urutan sistematis dari masalah-masalah arsip dan kartu-kartu kendali dalam file.

C. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antara masalah dengan anak masalahnya pada pola klasifikasi dengan memperhatikan efek dari prinsip berjenjang. Sebagai contoh, pemberian kode surat yang berisi masalah Anggaran Desa. Maka langkah pertama adalah menangkap isi pokok masalahnya (perincian pertama), kemudian merujuk kepada sub masalah (perincian kedua) dan selanjutnya mencantumkan kode perincian sub-sub masalah (perincian ketiga). Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang masalah Anggaran Desa harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 140. Selanjutnya diketahui bahwa 140 merupakan bagian dari 100 . Perinciannya sebagai berikut :

100 Pemerintahan (Perincian Pertama)

140 Pemerintahan Desa (Perincian Kedua)

141 -

142 Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa/APPKD
(Perincian Ketiga)

Dengan demikian pencantuman kode klasifikasi yang tepat tentang Anggaran Desa adalah 142.

2. Apabila dijumpai anak masalah lagi yang terdapat pada perincian ketiga, maka dapat dicantumkan lagi penambahan kode klasifikasi di belakang tanda titik (".") dari kode klasifikasi perincian ketiga sesuai dengan urutan masalahnya. Contoh penulisan kode masalah tentang Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) Rutin, maka pencantuman kode yang lebih tepat lagi adalah 142.1.

3. Apabila masalah yang terkandung dalam surat tidak dapat ditentukan masalah yang lebih rinci lagi maka pencantuman kode klasifikasi dapat menggunakan dengan kode klasifikasi perincian kedua, dan apabila kode klasifikasi perincian Kedua tidak ditemukan, maka pencantuman kode klasifikasi dapat menggunakan perincian pertama/dasar.
4. Untuk dapat mengklasifikasikan surat dengan kode yang paling tepat haruslah dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandang mana masalah itu disajikan. Untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah. Pada prinsipnya kode surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat harus benar-benar mencerminkan masalah surat yang sebenarnya. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Tidak cukup menentukan kode klasifikasi surat hanya berdasarkan pada perihal surat, karena pencantuman perihal seringkali tidak sesuai dengan masalah yang terkandung dalam surat. Harus selalu diingat bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung ketepatan pemberian kode.
5. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok/utama. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar bahwa masalah itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.

D. RINCIAN POLA KLASIFIKASI

1. Rincian Pertama/Dasar (Pokok Masalah)

- 000 U M U M
- 100 PEMERINTAHAN
- 200 POLITIK
- 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 500 PEREKONOMIAN
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
- 700 PENGAWASAN
- 800 KEPEGAWAIAN
- 900 KEUANGAN

2. Rincian Kedua (Sub Masalah)

- 000 U M U M**
 - 010 Urusan Dalam
 - 020 Peralatan
 - 030 Kekayaan Daerah
 - 040 Perpustakaan/Dokumen/Kearsipan/Sandi
 - 050 Perencanaan
 - 060 Organisasi/Ketatalaksanaan
 - 070 Penelitian
 - 080 Konferensi
 - 090 Perjalanan Dinas
- 100 PEMERINTAHAN**
 - 110 Pemerintah Pusat
 - 120 Pemerintah Provinsi
 - 130 Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 140 Pemerintah Desa
 - 150 Legislatif MPR/DPR
 - 160 DPRD Provinsi
 - 170 DPRD Kabupaten / Kota

180 Hukum
190 Hubungan Luar Negeri

200 POLITIK

210 Kepartaian
220 Organisasi Kemasyarakatan
230 Organisasi Profesi Dan Fungsional
240 Organisasi Pemuda
250 Organisasi Buruh, Tani Dan Nelayan
260 Organisasi Wanita
270 Pemilihan Umum
280 Panwaslu
290 -

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

310 Pertahanan
320 Kemiliteran/TNI
330 Keamanan
340 Pertahanan Sipil
350 Kejahatan
360 Bencana
370 Kecelakaan
380 -
390 -

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

410 Pembangunan Desa
420 Pendidikan
430 Kebudayaan
440 Kesehatan
450 Agama
460 Sosial
470 Kependudukan
480 Media Masa
490 -

500 PEREKONOMIAN

510 Perdagangan
520 Pertanian
530 Perindustrian
540 Pertambangan/Kesamudraan
550 Perhubungan
560 Tenaga Kerja
570 Modal Domestik
580 Perbankan Moneter
590 Agraria

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

610 Pengairan
620 Jalan
630 Jembatan
640 Bangunan
650 Tata Ruang Kota
660 Tata Lingkungan
670 Ketenagaan
680 Peralatan
690 Air Minum

700 PENGAWASAN

710 Bidang Pemerintahan
720 Bidang Politik

730 Bidang Keamanan /Ketertiban
740 Bidang Kesra
750 Bidang Perekonomian
760 Bidang Pekerjaan Umum
770 Pengawasan Pejabat Publik
780 Bidang Kepegawaian
790 Bidang Keuangan

800 KEPEGAWAIAN

810 Pengadaan
820 Mutasi
830 Kedudukan
840 Kesejahteraan Pegawai
850 Cuti
860 Penilaian
870 Tata Usaha Kepegawaian
880 Pemberhentian
890 Pendidikan Pegawai

900 KEUANGAN

910 Anggaran
920 Otorisasi
930 Verifikasi
940 Pembukuan
950 Perbendaharaan
960 Pembinaan Kebendaharaan
970 Pendapatan
980 Pengeluaran
990 Bendaharawan

3. Rincian Ketiga (Sub - Sub Masalah)

000 U M U M

001 Lambang
 001.1 Garuda
 001.2 Bendera Kebangsaan
 001.3 Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
002 Tanda Kehormatan/Penghargaan
 (untuk pegawai lihat 861 - 1)
 002.1 Bintang
 002.2 Satyalencana
 002.3 Satyakarya Nugraha
 002.4 Monumen
 002.5 Penghargaan Secara Adat
 002.6 Penghargaan Lainnya (Cinderamata)
003 Hari Raya / Hari besar
 003.1 Nasional, 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb
 003.2 Keagamaan
 003.3 Hari Ulang Tahun (HUT)/Hari Jadi
004 Ucapan
 004.1 Terima kasih
 004.2 Selamat
 004.3 Mohon Diri
 004.4 Bela Sungkawa
 004.5 Ucapan lainnya
005 Undangan
006 Tanda Jabatan
 006.1 Pamong Praja
 006.2 Pejabat Lainnya
007 Tanda Gambar Presiden,Wakil Presiden, Pejabat Pemerintah, dan
 para pahlawan

008 -
009 -

010 URUSAN DALAM

- 011 Gedung Kantor
 - 011.1 Instalasi Listrik
 - 011.2 Telepon
 - 011.3 Otomasi
 - 011.4 Air Minum
 - 011.5 Bak
 - 011.6 Hidrant
 - 011.7 Alarm
 - 011.8 Penangkal petir
- 012 Rumah dinas
 - 012.1 Tanah untuk rumah dinas
 - 012.2 Perabotan
- 013 Persinggahan
 - 013.1 Mess
 - 013.2 Wisma
 - 013.3 Hotel
 - 013.4 Persinggahan
- 014 Akomodasi
- 015 Penerangan Listrik
- 016 Telepon
- 017 Keamanan/Tata Tertib Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Keprotokolan
 - 019.1 Upacara Bendera
 - 019.2 Tata Tempat (Pemasangan gambar Pres/Wapres)
 - 019.3 Audiensi
 - 019.4 Alamat - alamat Kantor dan Pejabat
 - 019.5 Penerimaan Tamu
 - 019.6 Kerjasama
 - 019.7 Bandir / Umbul - umbul

020 PERALATAN

- 020.1 Penawaran
- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
 - 022.1 Manual
 - 022.2 Elektronik
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan
 - 024.1 Orang
 - 024.2 Barang
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata
- 027 Pengadaan
- 028 Inventaris
 - 028.1 Penghapusan
- 029 Pengurusan Kendaraan

030 KEKAYAAN DAERAH

- 031 Barang - barang tidak bergerak (tanah, kebun dll)
- 032 Barang - barang tidak bergerak (gedung, asrama, dll)
- 033 Barang - barang tidak bergerak (monumen)
- 034 Alat - alat besar
- 035 Hewan
- 036 Barang persediaan dalam gudang
- 037 Alat Pengangkut (darat, laut, udara)

038 Peralatan Kantor/pabrik

039 Peralatan Rumah sakit

040 PERPUSTAKAAN/DOKUMEN/KEARSIPAN/SANDI

041 Perpustakaan

041.1 Perpustakaan Umum

041.2 Perpustakaan Khusus

041.3 Perpustakaan perguruan tinggi

041.4 Perpustakaan Sekolah

041.5 Perpustakaan Keliling

041.6 Pengadaan Bahan Pustaka

041.7 Pelayanan

041.8 Pemeliharaan

041.9 Kerjasama antar perpustakaan

042 Dokumentasi

043 -

044 -

045 Kearsipan

045.1 Ekspedisi ke 2

045.2 Surat pengantar

045.3 Salah Kirim

045.4 Pola klasifikasi

045.5 Penataan berkas

045.6 Penyusutan Arsip

045.61 Pemindahan Arsip

045.62 Penyerahan Arsip

045.63 Pemusnahan Arsip

045.64 Jadwal Retensi Arsip

045.65 Berita Acara Penyusutan Arsip

045.66 Daftar pertelaan Arsip

045.7 Pembinaan Kearsipan

045.71 Bimbingan Teknis

045.72 Pemantauan/Monitoring Kearsipan

045.8 Pemeliharaan/perawatan arsip

045.81 Fumigasi

045.82 Pengawetan/konservasi

045.9 Layanan kearsipan

046 Sandi

047 Telegram, Telex, Radio, ISB

048 Data Elektronik

049 -

050 PERENCANAAN

Meliputi Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Perencanaan Umum Departemen Dalam Negeri. Klasifikasikan disini proyek-proyek pembangunan, Program Pembangunan Nasional (Propernas), Program Pembangunan Daerah (Properda), DUK, DIK, DUP, DPA, RKA, Laporan Fisik dan Keuangan Proyek Pembangunan, SIAP, Tender, Pemborong, Laporan Pelaksanaan Kinerja, Musrenbang, Musrenbangpus antar Departemen, Musrenbangnas

050.1 Renstra

050.11 Renstra Daerah,tambah kode Wilayah Kecamatan

050.12 Bantuan Pembangunan Daerah

050.13 Bapeda

050.2 Program Pembangunan Nasional (Propernas)

050.3 Program Pembangunan Daerah (Properda)

050.4 Rencana Kerja pemerintah (RKP)

- 051 Bidang Pemerintahan
Klasifikasikan disini : Proyek Fisik Pemerintahan Tambahkan Perincian 100 pada 051.
Contoh : Proyek Kepenjaraan 051.86
 - 051.1 DUP
 - 051.2 DPA
 - 051.3 RKA
- 052 Bidang Politik
 - 052.1 Laporan Keuangan
 - 052.2 Laporan Pelaksanaan Kinerja
- 053 Perencanaan Kegiatan Pembangunan
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Tambahkan rincian pada 400 pada 054.
Contoh : Proyek Obat-obatan:054.42
- 055 Bidang Perekonomian.
Tambahkan rincian 500 pada 055.
Contoh : Proyek Pasar: 055.112
- 056 Bidang Pekerjaan Umum.
Tambahkan rincian 600 pada 056.
Contoh : Proyek Jembatan : 056.3
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan
- 060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN**
- 061 Organisasi
 - 061.1 Susunan dan Tatakerja
 - 061.2 Tata tertib kantor, jam kerja
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Semi Pemerintah BKS-AKSI
- 065 Ketatalaksanaan
 - 065.1 Tata naskah dinas
 - 065.2 Stempel
 - 065.21 Stempel jabatan
 - 065.22 Stempel dinas
 - 065.3 Papan nama instansi pemerintah/non pemerintah
- 066 Tata Hubungan Kerja
 - 066.1 Telaah Tata Hubungan
 - 066.2 Penyusunan
 - 066.3 Bimbingan
- 067 Sistem dan Prosedur
 - 067.1 Telaahan
 - 067.2 Penyusunan
 - 067.3 Bimbingan
- 068 Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan
 - 068.1 Pemantauan Pelaksanaan
 - 068.2 Sistem Prosedur Kerja
 - 068.3 Evaluasi Pelaksanaan Sistem
 - 068.4 Rekomendasi Penyempurnaan Ketatalaksanaan
- 069 Analisis jabatan dan pengukuran beban kerja
 - 069.1 Analisis Jabatan
 - 069.2 Hasil Analisis Jabatan
 - 069.3 Penilaian jabatan Struktural dan Fungsional
- 070 PENELITIAN**
- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian

- 074 Kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
- 075 Kerjasama penelitian dengan LSM
- 076 Kerjasama penelitian dengan swasta (CV/PT)
- 077 Study Kelayakan
- 078 Study Kasus
- 079 Study Banding

080 KONFERENSI

- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen, Eselon lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 International di Dalam Negeri
- 086 Internasional di Luar Negeri
- 087 -
- 088 -
- 089 -

090 PERJALANAN DINAS

- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
- 094 Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan pegawai
- 095 Perjalanan Tamu asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

- 101 -
- 102 -
- 103 -
- 104 -
- 105 -
- 106 -
- 107 -
- 108 -
- 109 -

110 PEMERINTAH PUSAT

- 111 Presiden
 - Meliputi Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
 - 111.1 Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
 - 111.2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan
- 112 Wakil Presiden
 - Meliputi Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
- 113 Susunan Kabinet
 - 113.1 Resufle
 - 113.2 Penunjukan Menteri ad interim
 - 113.3 Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1
- 114 Departemen Dalam Negeri
 - 114.1 Amanat Menteri Dalam Negeri
- 115 Departemen lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara (MA,BPK)
- 117 Lembaga Non Departemen
- 118 Otonomi Desentralisasi

119 Kerjasama antar Departemen

120 PEMERINTAH PROVINSI

120.0 Laporan daerah, tambahkan kode wilayah
Monografi: tambahkan kode wilayah

120.1 Koordinasi

120.2 Instansi tingkat provinsi

120.21 Dinas Otonomi

120.22 Instansi Vertikal

121 Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah

Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya

122 Wakil Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah

Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya

123 Sekretaris Wilayah/Daerah, tambahkan kode wilayah Meliputi Pencalonan, serah terima jabatan

124 Badan-badan pertimbangan Daerah, Muspida

125 Pembentukan/Pemekaran

125.1 Pembentukan daerah otonom

125.2 Pembentukan wilayah

125.3 Perubahan batas wilayah

125.4 Pemekaran wilayah

125.5 Penambahan ibu kota propinsi, pemberian dan penggantian nama kota, daerah, gunung, sungai, pulau, selat, jalan, dsb

126 Pembagian Wilayah

127 Penyerahan Urusan

128 Swapraja

129 -

130 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

130.1 Koordinasi

130.2 Instansi tingkat Kabupaten/Kota

130.21 Dinas Otonomi

130.22 Instansi Vertikal

131 Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah.

Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan, LKPJ, LAMJ, dan sebagainya

132 Wakil Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah

Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya

133 Sekretaris Wilayah/Daerah, tambahkan kode wilayah

Meliputi pencalonan, serah terima jabatan

134 Badan-badan Daerah, meliputi Badan Pertimbangan Daerah

135 Pembentukan Daerah

135.1 Pembentukan Daerah Otonom

135.2 Pembentukan wilayah

135.3 Perubahan batas wilayah

135.4 Pemekaran wilayah

135.5 Permasalahan Batas Wilayah

135.6 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya

135.7 Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan

136 Pembagian Wilayah

137 Penyerahan Urusan

138 Pemerintahan Wilayah Kecamatan

138.1 Sambutan/Pengarahan/Amanat

138.2 Pembentukan kecamatan

138.3 Pemekaran kecamatan

138.4 Perluasan/perubahan batas wilayah kecamatan

- 138.5 Pindahan ibu kota kecamatan
- 138.6 Laporan kecamatan
- 139 Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK)
- 140 PEMERINTAH DESA**
- 141 Pemerintahan Desa, Kelurahan
 - 141.1 Kepala desa, kelurahan meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, LPJ, dsb
 - 141.11 Biaya pemilihan kepala desa
 - 141.2 LMD/BPD, LPPMD, meliputi pembentukan, keanggotaan, kepengurusan dan kegiatan
 - 141.3 Perangkat desa, kelurahan
 - 141.31 Sekretaris Desa/Kepala Urusan meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara
 - 141.32 Kepala Dusun, meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara
 - 141.33 Pembantu Perangkat Desa (Kayim, P3N, Pembantu Kaur, Pembantu Kadus, dll) meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara
- 142 Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)
 - 142.1 Rutin (termasuk penghasilan Pamong Desa)
 - 142.2 Pembangunan
 - 142.3 Anggaran Belanja Tambahan
 - 142.4 Pendapatan Desa
 - 142.41 Urusan Desa
 - 142.42 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
 - 142.43 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi
 - 142.44 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/kota
 - 142.45 Penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan kepada desa
 - 142.46 Penerimaan dari Pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di luar desa
 - 142.47 Pendapatan Asli Desa
 - 142.48 Penerimaan lain - lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku
 - 142.49 Hasil dari Gotong royong Masyarakat
- 143 Kekayaan Desa
 - 143.1 Tanah hak pakai desa
 - 143.11 Tanah bengkok
 - 143.12 Tanah titisara
 - 143.13 Tanah penganggonan
 - 143.14 Tanah desa lainnya
 - 143.2 Jalan Desa
 - 143.3 Bangunan Desa
 - 143.4 Badan Usaha Milik Desa
- 144 Lembaga - lembaga tingkat Desa
 - 144.1 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan

- 146.1 Pemekaran desa/kelurahan
- 146.2 Pembentukan desa/kelurahan
- 146.3 Perubahan batas wilayah/perluasan desa/Kelurahan
- 146.4 Perubahan nama - nama Desa/Kelurahan
- 146.5 Permasalahan batas desa
- 146.6 Penyatuan Desa/Kelurahan
- 146.7 Penghapusan Desa/Kelurahan
- 147 Lembaga - lembaga tingkat desa jangan diklasifikasikan di sini.
Lihat 410 dengan perinciannya
- 148 RT - RW/RK
- 149 -
- 150 MPR/DPR/DPD**
- 151 Keanggotaan MPR
 - 151.1 Pencalonan
 - 151.2 Pengangkatan
 - 151.3 Pemberhentian
 - 151.31 Recall
 - 151.32 Meninggal
 - 151.4 Pelanggaran
- 152 Persidangan
- 153 Kesejahteraan
 - 153.1 Keuangan
 - 153.2 Penghargaan
- 154 Hak
- 155 Keanggotaan DPR
 - 155.1 Pencalonan
 - 155.2 Pengangkatan
 - 155.3 Pemberhentian
 - 155.31 Recall
 - 155.32 Meninggal
 - 155.4 Pelanggaran
- 156 Persidangan
 - 156.1 Sidang Pleno
 - 156.2 Dengar pendapat
 - 156.3 Rapat Komisi
 - 156.4 Reses
- 157 Kesejahteraan
 - 157.1 Keuangan
 - 157.2 Penghargaan
- 158 Jawaban pemerintah
- 159 Hak
- 160 DPRD PROVINSI**
- 161 Keanggotaan
 - 161.1 Pencalonan
 - 161.2 Pengangkatn
 - 161.3 Pemberhentian
 - 161.31 Recall
 - 161.32 Meninggal
 - 161.4 Pelanggaran
- 162 Persidangan
 - 162.1 Sidang Pleno
 - 162.2 Dengar Pendapat
 - 162.3 Rapat - rapat meliputi Rapat Panitia musyawarah, komisi, panitia khusus, dsb
 - 162.4 Fraksi
 - 162.5 Tata tertib
 - 162.6 Reses
 - 162.7 Peninjauan study banding

- 163 Kesejahteraan
 - 163.1 Keuangan
 - 163.2 Penghargaan
- 164 Hak
- 165 Sekretaris DPRD Provinsi
- 166 -
- 167 -
- 168 -
- 169 -
- 170 DPRD KABUPATEN / KOTA**
- 171 Keanggotaan
 - 171.1 Pencalonan
 - 171.2 Pengangkatan
 - 171.3 Pemberhentian
 - 171.31 Recall
 - 171.32 Meninggal
 - 171.33 Penggantian antar waktu
 - 171.4 Pelanggaran
- 172 Persidangan
 - 172.1 Sidang Pleno
 - 172.2 Dengar Pendapat
 - 172.3 Rapat - rapat meliputi rapat panitia musyawarah, komisi, panitia khusus dsb
 - 172.4 Fraksi
 - 172.5 Tata tertib
 - 172.6 Reses
 - 172.7 Peninjauan study banding
- 173 Kesejahteraan
 - 173.1 Keuangan
 - 173.2 Penghargaan
- 174 Hak
- 175 Sekretaris DPRD Kab/Kota
- 176 -
- 177 -
- 178 -
- 179 -
- 180 HUKUM**
- 180.1 Konstitusi
 - 180.11 Dasar Negara
 - 180.12 Undang - undang Dasar
- 180.2 GBHN
- 180.3 Konvensi
- 181 Perdata
 - 181.1 Tanah
- 182 Pidana
- 183 Peradilan
 - 183.1 Jenis - jenis peradilan
 - 183.11 Peradilan Umum
 - 183.111 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
 - 183.112 Pengadilan Tinggi
 - 183.113 Mahkamah Agung
 - 183.12 Peradilan Agama Islam
 - 183.121 Pengadilan agama islam tingkat Pertama
 - 183.122 Pengadilan Tinggi Agama Islam
 - 183.123 Mahkamah Agama Islam Agung
 - 183.13 Peradilan Militer

- 183.131 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
- 183.132 Mahkamah Militer Tinggi
- 183.133 Mahkamah Militer Agung
- 183.14 Peradilan Tata Usaha negara
 - 183.141 Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
 - 183.142 Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara
 - 183.143 Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
- 183.2 Upaya Hukum
 - 183.21 Banding
 - 183.22 Kasasi
 - 183.23 Derden Verset
 - 183.24 Peninjauan Kembali
- 183.3 Eksekusi
- 183.4 Pembinaan Hukum
 - 183.41 Pembinaan Kesadaran Hukum (KADARKUM)
- 183.5 Bantuan Hukum
 - 183.51 Lembaga bantuan hukum
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
- 186 Kepenjaraan
- 187 Kejaksanaan
- 188 Peraturan Perundang-undangan
 - 188.1 TAP MPR
 - 188.2 Undang - Undang
 - 188.3 Peraturan
 - 188.31 Peraturan Pemerintah
 - 188.32 Peraturan Presiden
 - 188.33 Peraturan Menteri
 - 188.34 Peraturan Lembaga Non Departemen
 - 188.35 Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
 - 188.36 Peraturan Gubernur
 - 188.37 Peraturan Bupati/Walikota
 - 188.38 Peraturan Kepala Desa
 - 188.39 Peraturan Lainnya
 - 188.4 Keputusan
 - 188.41 Keputusan Presiden
 - 188.42 Keputusan Menteri
 - 188.43 Keputusan Lembaga Non Departemen
 - 188.44 Keputusan Gubernur
 - 188.45 Keputusan Bupati/Walikota
 - 188.46 Keputusan Kepala Desa
 - 188.47 Keputusan Lainnya
 - 188.5 Instruksi
 - 188.51 Instruksi Presiden
 - 188.52 Instruksi Menteri
 - 188.53 Instruksi Lembaga Non Departemen
 - 188.54 Instruksi Gubernur
 - 188.55 Instruksi Bupati/Walikota
 - 188.6 Surat Edaran
- 189 Hukum Adat
 - 189.1 Tokoh Adat/masyarakat
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI**
- 191 Perwakilan Asing
- 192 Tamu Negara

- 193 Kerjasama dengan Negara asing
- 194 Perwakilan RI di Luar Negeri
- 195 PBB
- 196 Laporan Luar Negeri
- 197 -
- 198 -
- 199 -

200 POLITIK

- 201 Perencanaan dan program Pembinaan Politik Luar Negeri
 - 201.1 Keadaan Politik Luar Negeri
- 202 Pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri termasuk laporannya
 - 202.1 Pembinaan Ideologi Pancasila
 - 202.2 Kesatuan Bangsa Organisasi kekuatan sosial politik
 - 202.3 Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
 - 202.4 Hasil Evaluasi dan tata mengenai Ipoleksosbud, Kamtibmas
- 203 -
- 204 -
- 205 -
- 206 -
- 207 -
- 208 -
- 209 -

210 KEPARTAIAN

- 210.1 Parpol
 - 210.11 Pendirian/pembentukan PARPOL
 - 210.12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parpol
 - 210.13 Program Kerja, data kegiatan PARPOL
 - 210.14 Pembinaan PARPOL
 - 210.15 Hasil Munas/Musda PARPOL
 - 210.16 Struktur/kepengurusan, pengkaderan dan keanggotaan PARPOL
 - 210.17 Data Inventaris dan keuangan PARPOL
 - 210.18 Perselihan PARPOL
- 211 Partai Demokrasi Indonesia
- 212 Partai Golongan Karya
- 213 Partai Persatuan Pembangunan
- 214 Partai Peserta Pemilu
- 215 Partai/Organisasi terlarang
 - 215.1 Keputusan Pembubaran partai/organisasi terlarang
 - 215.2 Daftar dan data pengurus anggota partai organisasi terlarang
 - 215.3 Ijin meninggalkan tempat atau domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang
 - 215.4 Daftar berkala mengenai keadaan organisasi /anggota partai
 - 215.5 Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang
- 216 -
- 217 -
- 218 -
- 219 -

220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- 220.1 Pembentukan Organisasi
- 202.3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 202.4 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 202.5 Program Kerja organisasi
- 202.6 Munas/Musda Tk.I dan Tk.II
- 202.7 Pembinaan Organisasi
 - 202.71 Kegiatan Organisasi
 - 202.72 Daftar Inventarisasi Kekayaan Organisasi
 - 202.73 Pembentukan Organisasi
 - 202.74 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
 - 202.75 Kepengurusan dasar dan daftar anggota organisasi
 - 202.76 Program Kerja Organisasi
- 202.8 Laporan Kegiatan organisasi
- 221 Jenis Organisasi
 - 221.1 Berdasarkan Perjuangan
 - 221.11 Perintis Kemerdekaan
 - 221.12 Angkatan 45
 - 221.13 Veteran
 - 221.2 Berdasarkan Kekayaan
 - 221.21 PEPABRI
 - 221.22 Wreda Tama
 - 221.23 Pensiunan PNS
 - 221.3 Berdasarkan Kerokhanian
 - 221.31 Muhamadiyah
 - 221.32 NU
 - 221.33 Persatuan Tarikat Islam
 - 221.31 Al Irsyad
- 222 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- 223 -
- 224 -
- 225 -
- 226 -
- 227 -
- 228 -
- 229 -

230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL

- 231 Ikatan Dokter Indonesia / IBI / PPNI
- 232 Persatuan Guru Republik Indonesia
- 233 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
- 234 Persatuan Advokat Indonesia
- 235 Lembaga Bantuan Hukum
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Persatuan Wartawan Indonesia
- 238 Ikatan Arsiparis Indonesia
- 239 Ikatan Pustakawan Indonesia

240 ORGANISASI PEMUDA

- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Gerakan Pemuda Ansor
- 245 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
- 246 Gerakan Pemuda Marhaenis
- 247 -
- 248 -
- 249 -

250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN

- 251 Federasi Buruh Seluruh Indonesia / SPSI
- 252 Organisasi Buruh Internasional
- 253 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
- 254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
- 256 -
- 257 -
- 258 -
- 259 -

260 ORGANISASI WANITA

- 261 Dharma Wanita
- 262 Konggres Wanita Indonesia
- 263 Persatuan Wanita Republik Indonesia
- 264 Dharma Pertiwi
- 265 Bhayangkari
- 266 Jala Sanastri
- 267 Persit Kartika Candra Kirana
- 268 -
- 269 -

270 PEMILIHAN UMUM

- 270.1 Legislatif
- 270.2 Presiden dan Wakil
- 270.3 Gubernur dan Wakil
- 270.4 Bupati/Walikota dan Wakil
- 271 Pencalonan
 - 271.1 Legislatif
 - 271.2 Presiden dan Wakil
 - 271.3 Gubernur dan Wakil
 - 271.4 Bupati/Walikota dan Wakil
- 272 Tanda gambar
- 273 Kampanye
- 274 Petugas Pemilu
- 275 Pemilih
- 276 Sarana
 - 276.1 TPS
 - 276.2 Kendaraan
 - 276.3 Surat Suara
 - 276.4 Kotak Suara
- 277 Pemungutan Suara
- 278 Hasil Pemilu
- 279 KPU

280 PANWASLU

- 281 Pelanggaran Pemilu
- 282 Pemantau Pemilu
- 283 Sengketa Pemilu
- 284 -
- 285 -
- 286 -
- 287 -
- 288 -
- 289 -

290 -

- 291 -
- 292 -
- 293 -
- 294 -

295 -
296 -
297 -
298 -
299 -

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
300.2 Pembinaan dan pengaturan mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi
300.3 Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan/ketertiban umum
300.4 Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
300.5 Laporan dari Instansi yang berwenang
300.6 Laporan adanya kejadian teroris
300.7 Pengamanan sidang
300.8 Pengawalan pejabat / tamu negara
301 Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (trantibum)
302 Pengawasan Trantibum
303 Pelaksanaan penegakan Perda
304 Pembinaan/penyuluhan pelanggaran Perda
305 Patroli Wilayah
306 -
307 -
308 -
309 -

310 PERTAHANAN

311 Darat
312 Laut
313 Udara
314 -
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -

320 KEMILITERAN/TNI

321 Latihan Militer
322 Wajib Militer
323 Operasi Militer
324 Kekaryaannya TNI/Polri
325 TNI Masuk Desa / TMMD
326 -
327 -
328 -
329 -

330 KEAMANAN

331 Kepolisian
331.1 Polisi Pamong Praja
332 Huru-hara/Demonstrasi
333 Senjata api/tajam
334 Bahan Peledak
335 Perjudian
336 Surat-surat Kaleng
337 -

338 -

339 -

340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- 340.1 Kebijakan Pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan Matrik Linmas
 - 340.11 Pengankatan/Pemberhentian Anggota Linmas
 - 340.12 Pengerahan dan pengendalian Linmas
 - 340.13 Kegiatan pelaksanaan matrik Linmas dan Menwa
 - 340.14 Pembinaan anggota Linmas
 - 340.15 Penghargaan anggota Linmas
 - 340.16 Linmas lanjut usia
 - 340.17 Data matrik Linmas dan Menwa
 - 340.18 Pendidikan/Latihan Linmas dan Menwa
 - 340.19 Latihan ketrampilan PAM Swakarsa
- 340.2 Orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh masyarakat
 - 340.21 Orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh
 - 340.22 Pemberian tali asih bagi anggota

341 -

342 -

343 -

344 -

345 -

346 -

347 -

348 -

349 -

350 KEJAHATAN

- 351 Subversi / Makar / Pemberontakan
- 352 Pembunuhan
- 353 Penganiayaan, Pencurian/Perampasan
- 354 Penyelundupan/Narkotika
- 355 Pemalsuan
 - 355.1 Uang
 - 355.2 Ijasah
 - 355.3 Kajahatan pemalsuan lainnya
- 356 Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan
- 357 Perkosaan/Perbuatan Cabul
- 358 Kenakalan
- 359 Kejahatan lainnya
 - 359.1 KDRT
 - 359.2 Trafficking / Perdagangan Orang
 - 359.3 dll

360 BENCANA

- 361 Gunung berapi/gempa
- 362 Banjir/Tanah longsor
- 363 Angin Topan
- 364 Kebakaran
 - 364.1 Pemadam kebakaran
- 365 Kekeringan
- 366 Kelaparan
- 367 Tsunami
- 368 -
- 369 -

370 KECELAKAAN

(Klasifikasi disini : SAR)

- 371 Latihan SAR Anggota Menwa

- 372 Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam
- 373 Pelatihan manajemen bagi pejabat
- 374 Satkorlak dan Satlak PBP
- 375 Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
- 376 Latihan ketrampilan pemadam kebakaran
- 377 Kecelakaan lalulintas jalan raya
- 378 Kecelakaan udara
- 379 Kecelakaan laut

- 380** -
- 381 -
- 382 -
- 383 -
- 384 -
- 385 -
- 386 -
- 387 -
- 388 -
- 399 -

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 401 -
- 402 -
- 403 -
- 404 -
- 405 -
- 406 -
- 407 -
- 408 -
- 409 -

410 PEMBANGUNAN DESA

- 411 Pembinaan usaha gotong royong
 - 411.1 Swadaya gotong-royong
 - 411.11 Penataan gotong-royong
 - 411.12 Gotong royong dinamis
 - 411.13 Gotong royong statis
 - 411.14 Pungutan
 - 411.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
 - 411.21 Pembinaan
 - 411.22 Klasifikasi
 - 411.23 Proyek
 - 411.24 Musyawarah
 - 411.3 Latihan Kerja Masyarakat
 - 411.31 Kader Masyarakat
 - 411.32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - 411.33 Pusat latihan
 - 411.34 Kursus-kursus
 - 411.35 Kurikulum/Sylabus
 - 411.36 Ketrampilan
 - 411.37 Pramuka
 - 411.4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
 - 411.41 Program
 - 411.42 Pembinaan Organisasi
 - 411.43 Kegiatan
 - 411.5 Penyuluhan
 - 411.51 Publikasi
 - 411.52 Peragaan
 - 411.53 Sosio Darma
 - 411.54 Siaran Pedesaan

- 411.55 Penyuluhan lapangan
- 411.6 Kelembagaan Desa
 - 411.61 Kelompok Tani
 - 411.62 Rukun Tani
 - 411.63 Subak
 - 411.64 Dharma Tirta
- 412 Perekonomian Desa
 - 412.1 Produksi Desa
 - 412.11 Pengolahan
 - 412.12 Pemasaran
 - 412.13 Tempat penyimpanan/gudang
 - 412.2 Keuangan Desa
 - 412.21 Perkreditan Desa
 - 412.22 Inventarisasi Data
 - 412.23 Perkembangan/Pelaksanaan
 - 412.24 Bantuan/Simulasi
 - 412.25 Petunjuk/Pembinaan pelaksanaan
 - 412.3 Koperasi Desa
 - 412.31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
 - 412.32 Koperasi Unit Desa (KUD)
 - 412.4 Penataan Bantuan pembangunan Desa
 - 412.41 Jumlah Desa yang diberi bantuan
 - 412.42 Pengarahan
 - 412.43 Pusat
 - 412.44 Daerah
 - 412.5 Alokasi Bantuan pembangunan Desa
 - 412.51 Pusat
 - 412.52 Daerah
 - 412.6 Pelaksanaan Bantuan pembangunan Desa
 - 412.61 Bantuan langsung
 - 412.62 Bantuan Keserasian
 - 412.63 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Prasarana Desa
 - 413.1 Prasarana desa
 - 413.11 Pembinaan
 - 413.12 Bimbingan Teknis
 - 413.2 Pemukiman Kembali Penduduk
 - 413.21 Lokasi
 - 413.22 Diskusi
 - 413.23 Pelaksanaan
 - 413.3 Masyarakat Pradesa
 - 413.31 Pembinaan
 - 413.32 Penyuluhan
 - 413.4 Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa
 - 413.41 Rumah sakit
 - 413.42 Proyek perintis pelaksanaan
 - 413.43 Pengembangan
 - 413.44 Perbaikan kampung
- 414 Pengembangan Desa
 - 414.1 Tingkat Perkembangan Desa
 - 414.12 Jumlah Desa
 - 414.13 Pemekaran Desa
 - 414.14 Pembentukan Desa baru
 - 414.15 Evaluasi
 - 414.16 Bagian
 - 414.2 Unit Daerah Kerja pembangunan (UDKP), Musrenbang Kecamatan
 - 414.21 Penyuluhan Program/Fasilitas program

- 414.22 Lokasi UDKP
- 414.23 Pelaksanaan
- 414.24 Bimbingan/Pembinaan
- 414.25 Evaluasi
- 414.3 Tata Desa/Profil Desa dan Kelurahan
 - 414.31 Inventarisasi
 - 414.32 Penyuluhan Pola Tata desa
 - 414.33 Pemetaan
 - 414.34 Pedoman Pelaksanaan
 - 414.35 Evaluasi
- 414.4 Perlombaan Desa
 - 414.41 Pedoman
 - 414.42 Penilaian
 - 414.43 Kejuaraan
 - 414.44 Piagam
- 415 Koordinasi
 - 415.1 Sektor Khusus
 - 415.2 Rapat Koordinasi Horisontal
 - 415.3 Team Koordinasi pusat (TKP)
 - 415.4 Kerjasama
 - 415.41 Luar Negeri (Unicef)
 - 415.42 Perguruan Tinggi
 - 415.43 Departemen/Lembaga Non Departemen
- 416 -
- 417 -
- 418 -
- 419 -
- 420 PENDIDIKAN**
- 421 Sekolah
 - 421.1 Prasekolah
 - 421.11 PAUD
 - 421.12 TK
 - 421.2 Sekolah Dasar
 - 421.3 Sekolah Menengah
 - 421.4 Sekolah Tinggi
 - 421.5 Sekolah Kejuruan
 - 421.6 Kegiatan Sekolah Dies Natalis, Lustrum
 - 421.7 Kegiatan pelajar Reuni, Darmawisata, lomba
Klasifikasi disini: Pelajar Teladan,Pertukaran Pelajar
 - 421.8 Sekolah pendidikan Luar Biasa
 - 421.9 Pendidikan luar sekolah/pemberantasan buta huruf
- 422 Administrasi Sekolah
 - 422.1 Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian pendaftaran, mapram, perpeloncoan, OSPEK
 - 422.2 Tahun pelajaran
 - 422.3 Hari libur
 - 422.4 Uang Sekolah
Klasifikasi disini SPP
 - 422.5 Bea Siswa
 - 422.6 Ijasah
- 423 Metode Belajar
 - 423.1 Kuliah
 - 423.2 Ceramah,Simposium,Seminar
 - 423.3 Diskusi
 - 423.4 Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN
 - 423.5 Pebdidikan Sistem Ganda (PSG)

- 423.6 Kurikulum
- 423.7 Karya Tulis, Karya Ilmiah
- 423.8 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar
 - Guru, Dosen, Dekan, Rektor
 - Klasifikasi disini: Guru teladan
- 425 Sarana pendidikan
 - 425.1 Gedung
 - 425.11 Gedung Sekolah
 - 425.12 Kampus
 - 425.13 Pusat kegiatan
 - 425.14 Perpustakaan
 - 425.15 Laboratorium
 - 425.2 Buku
 - 425.3 Perlengkapan sekolah
 - 425.4 Sistem Informasi pendidikan
- 426 Keolahragaan
 - 426.1 Cabang olah raga
 - 426.2 Sarana
 - 426.21 Gedung Olah raga
 - 426.22 Stadion
 - 426.23 Lapangan
 - 426.24 Kolam renang
 - 426.3 Pesta Olah Raga
 - Klasifikasi disini :PON, PORSADA, Olimpiade, PORSENI
 - 426.4 Hobby
- 427 Kepemudaan
 - Meliputi Organisasi dan kegiatan Remaja klasifikasi disini :
 - Gelanggang Remaja
- 428 Kepramukaan
 - 428.1 Pramuka Siaga
 - 428.2 Pramuka Penggalang
 - 428.3 Pramuka Penegak
 - 428.4 Pramuka Pandega
 - 428.5 Pramuka Pembina
- 429 Pendidikan Kedinasan
 - Lihat 890
- 430 KEBUDAYAAN**
- 431 Kesenian
 - 431.1 Cabang Kesenian
 - 431.2 Sarana
 - 431.21 Gedung Kesenian
 - 431.22 Padepokan
 - 431.3 Pertunjukan/Festival/Pagelaran
- 432 Kepurbakalaan
 - 432.1 Museum
 - 432.2 Peninggalan Kuno
 - 432.21 Candi, termasuk pemugaran
 - 432.22 Arca
 - 432.23 Fosil
 - 432.24 Prasasti
 - 423.25 Benda Cagar Budaya lainnya
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha pertunjukan, hiburan,kesenangan
- 436 Kepercayaan
- 437 -
- 438 -

439 -

440 KESEHATAN

- 440.1 Surat Keterangan Dokter
- 440.2 Rujukan pasien
- 440.3 Visum et Reperetum
- 441 Pembinaan Kesehatan
 - 441.1 Gigi
 - 441.2 Mata
 - 441.3 Jiwa
 - 441.4 Kanker
 - 441.5 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - 441.6 Perawatan
 - 441.7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
 - 441.8 Kesehatan Ibu dan anak
 - 441.9 Sistem Kesehatan Nasional
 - 441.91 JPS BK (Jaringan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
- 442 Obat-obatan
 - 442.1 Pengadaan
 - 442.2 Penyimpanan
 - 442.3 Obat generik
 - 442.4 Pemalsuan
 - 442.5 Obat terlarang
- 443 Pemberantasan Penyakit
 - 443.1 Pencegahan
 - 443.2 Pemberantasan dan pencegahan Penyakit Menular langsung(P2ML)
 - 443.21 Kusta
 - 443.22 Kelamin, HIV, AIDS,IMS
 - 443.23 Frambusia
 - 443.24 T.B.C
 - 443.3 Epidemiology dan Karantina (Epidka)
 - 443.31 Kholera
 - 443.32 Imunisasi
 - 443.33 Survailense
 - 443.34 Antrak
 - 443.35 leptosiroosis
 - 443.36 Chikungunya
 - 443.37 SARS
 - 443.4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P.2.B)
 - 443.41 Malaria
 - 443.42 Dengue Haemorrhagie Fever (Demam Berdarah,DHF)
 - 443.43 Filaria
 - 443.44 Serangga
 - 443.45 Rabies
 - 443.46 Flu burung
 - 443.5 Higiene Sanitasi
 - 443.51 Tempat2 pembuatan dan penjualan makanan dan minuman, jasa boga
 - 443.52 Sarana air minum
 - 443.53 Pestisida
 - 443.54 Pencemaran Udara
 - 443.55 Jamban Keluarga
 - 443.56 Kesehatan institusi
 - 443.6 Pemberantasan penyakit tidak menular
 - 443.61 A.Pektoris

- 443.62 I M A
- 443.63 Hipertensi
- 443.64 Stroke
- 443.65 Diabetus Militus (DM)
- 443.66 CA.Service
- 443.67 CA.Mammae
- 443.68 CA.Hepar
- 443.69 CA.Paru
- 443.7 DEKOPENSATIOKORDIS
 - 443.71 PPOM
 - 443.72 Asma
 - 443.73 Kecelakaan Lalu Lintas
 - 443.74 Psikosis
- 444 Gizi
 - 444.1 Kekurangan makanan
 - 444.2 Bahaya kelaparan, busung lapar
 - 444.3 Keracunan makanan
 - 444.4 Menu makanan rakyat
 - 444.5 Gondok endemik (GAKY)
- 445 Rumah sakit
 - 445.1 RSUP/RSUD
 - 445.2 Rumah sakit Jiwa
 - 445.3 Rumah Sakit mata
 - 445.4 PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
 - 445.5 Poliklinik (Balai Kesehatan)
 - 445.6 Rumah Bersalin
 - 445.7 Posyandu
 - 445.8 Rumah sakit/Balai Kesehatan lainnya
 - 445.9 Laboratorium Kesehatan
 - 445.91 Apotik
- 446 Tenaga Medis
 - 446.1 Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
 - 446.2 Diklat Tenaga Kesehatan (medis)
 - 446.3 Diklat Tenaga Kesehatan (para medis)
 - 446.4 Pendidikan Kesehatan
- 447 Peralatan Kesehatan
 - 447.1 Pengadaan alat kesehatan
 - 447.2 Penyimpanan alat kesehatan
 - 447.3 Standarisasi alat kesehatan
 - 447.4 Penghapusan alat kesehatan
- 448 Pengobatan tradisional
 - 448.1 Pijat
 - 448.2 Tusuk jarum
 - 448.3 Jamu tradisional
 - 448.4 Dukun / paranormal
 - 448.5 Pengobatan alternatif
- 449 Perijinan
 - 449.1 Surat Ijin Praktek (SIP)
 - 449.2 Surat Ijin Kerja (SIK)
- 450 A G A M A**
- 451 Islam
 - 451.1 Peribadatan
 - 451.11 Sholat
 - 451.12 Zakat, Fitrah
 - 451.13 Puasa
 - 451.14 Haji (jangan diklasifikasikan disini. Lihat 456)
 - 451.2 Rumah sholat
 - 451.3 Tokoh agama

- 451.4 Pendidikan
 - 451.41 Tinggi
 - 451.42 Menengah
 - 451.43 Dasar
 - 451.44 Pondok Pesantren
 - 451.45 Gedung Sekolah
 - 451.46 Tenaga Pengajar
 - 451.47 Buku
 - 451.48 Dakwah
 - 451.49 Organisasi / lembaga pendidikan
- 451.5 Harta Agama Wakaf, Baitalmal dsb
- 451.6 Pendidikan
- 451.7 Organisasi keagamaan bukan politik, Majelis Ulama
- 451.8 Peribadatan
- 452 Protestan
 - 452.1 Peribadatan
 - 452.2 Rumah Ibadat
 - 452.3 Tokoh Agama, Rokhaniawan, Pendeta, Domine
 - 452.4 Mazhab
 - 452.5 Organisasi Gerejani
- 453 Katholik
 - 453.1 Peribadatan
 - 453.2 Rumah Ibadat
 - 453.3 Tokoh agama, Rokhaniawan, Pastur
 - 453.4 Mazhab
 - 453.5 Organisasi Gerejani
- 454 Hindu
 - 454.1 Peribadatan
 - 454.2 Rumah Ibadat
 - 454.3 Tokoh Agama, Rokhaniawan
 - 454.4 Mazhab
 - 454.5 Organisasi Agama Hindu
- 455 Budha
 - 455.1 Peribadatan
 - 455.2 Rumah Ibadat
 - 455.3 Tokoh agama, Rokhaniawan
 - 455.4 Mazhab
 - 455.5 Organisasi Agama Budha
- 456 Urusan Haji
- 457 -
- 458 -
- 459 -

460 S O S I A L

- 461 Rehabilitasi penderita cacat
 - 461.1 Cacat Mata
 - 461.2 Cacat Tubuh
 - 461.3 Cacat Mental
 - 461.4 Bisu / Tuli
 - 461.5 Cacat Ganda
- 462 Tuna Sosial
 - 462.1 Gelandangan
 - 462.2 Pengemis
 - 462.3 Tuna Susila
 - 462.4 Anak nakal
 - 462.5 Tuna Wisma
- 463 Kesejahteraan anak / keluarga
 - 463.1 Anak putus sekolah
 - 463.2 Ibu teladan

- 463.3 Data anak yatim / piatu
- 463.4 Perlindungan Anak
- 464 Pembinaan Pahlawan
 - 464.1 Pahlawan
Meliputi penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan tandanya
 - 464.2 Perintis kemerdekaan
Meliputi pembinaan, penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan tandanya
 - 464.3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan sosial
 - 465.1 Lanjut Usia
 - 465.2 Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
- 466 Sumbangan sosial
 - 466.1 Korban bencana
 - 466.2 Pencarian dana untuk sumbangan.
Meliputi : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazaar dan sebagainya
 - 466.3 Panti Asuhan
 - 466.4 Panti Jompo
- 467 Bimbingan Sosial
 - 467.1 Masyarakat Suku Terasing
meliputi : Bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, operasi busana dan sebagainya
- 468 PMI
 - 468.1 Kepengurusan
 - 468.2 PMR (Palang Merah Remaja)
- 469 Makam
 - 469.1 Umum
 - 469.2 Pahlawan
 - 469.3 Khusus keluarga, Raja
 - 469.4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN**
- 471 Kewarganegaraan Indonesia
 - 471.1 WNI Asli
 - 471.2 WNI Keturunan Asing
 - 471.21 Permohonan kewarganegaraan
 - 471.22 Permohonan ganti nama
 - 471.3 Asimilasi
- 472 Kewarganegaraan Asing
- 473 Tidak berkewarganegaraan (state less)
- 474 Pendaftaran Penduduk
 - 474.1 Kelahiran
 - 474.11 Adopsi
 - 474.2 Perkawinan/perceraian/rujuk
 - 474.3 Kematian
 - 474.4 Kartu penduduk (KTP)
 - 474.5 Kartu Keluarga (KK)
- 475 Transmigrasi
 - 475.1 Penyiapan informasi daerah transmigrasi
 - 475.11 Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi
 - 475.12 Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
 - 475.13 Pemasyarakatan/sosialisasi transmigrasi
 - 475.14 Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dlm penyampaian informasi transmigrasi

- 475.15 Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian
- 475.16 Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
- 475.17 Kerjasama di bidang transmigrasi
- 475.18 Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik

- 475.2 Permukiman transmigrasi
 - 475.21 Penggunaan tanah permukiman transmigrasi
 - 475.22 Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
 - 475.23 Tata ruang satuan kawasan pengembangan, studi kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
 - 475.24 Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/peta informasi permukiman
 - 475.25 Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum/social dan jaringan transportasi
 - 475.26 Tanah permukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
 - 475.27 Penyelesaian masalah tanah di lokasi permukiman transmigrasi
 - 475.28 Tata ruang pemukiman transmigrasi
 - 475.281 Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
 - 475.282 Rancangan kapling TSM
 - 475.283 Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
 - 475.284 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
 - 475.285 Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
 - 475.286 Pengukuran batas unit pemukiman
 - 475.287 Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
 - 475.29 Sarana pemukiman transmigrasi
 - 475.291 Pembinaan dan pengendalian, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum
 - 475.292 Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
 - 475.293 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
 - 475.294 Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
 - 475.295 Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan

- 475.3 Pengerahan, pemindahan dan penempatan
 - 475.31 Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
 - 475.32 Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
 - 475.33 Pengerahan
 - 475.331 Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
 - 475.332 Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran
 - 475.333 Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
 - 475.34 Pemberangkatan transmigran
 - 475.341 Pengangkutan transmigran melalui laut, udara dan darat
 - 475.342 Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
 - 475.343 Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
 - 475.344 Pengawasan perjalanan transmigran
 - 475.345 Pengaturan rute pemberangkatan
 - 475.346 Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
 - 475.35 Penempatan transmigran
 - 475.351 Kesiapan lokasi dan daya tampung
 - 475.352 Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina
 - 475.353 Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
 - 475.354 Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
- 475.4 Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan Transmigran
 - 475.41 Pelatihan transmigran
 - 475.411 Program pengajaran dan metode pelatihan
 - 475.412 Penyusunan silabus dan modul pelatihan
 - 475.413 Penyusunan calon peserta / pelatih
 - 475.42 Penampungan transmigran di transito
 - 475.421 Pelayanan kesehatan bagi transmigran
 - 475.422 Pelayanan makanan bagi transmigran
 - 475.423 Pelayanan perbekalan/peralatan bagi transmigran
- 475.5 Pembinaan masyarakat transmigrasi
 - 475.51 Identifikasi dan penjajagan pembinaan
 - 475.512 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
 - 475.513 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
 - 475.514 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan

- 475.52 Pembinaan pendidikan
 - 475.521 Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
 - 475.522 Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
 - 475.53 Pelaksanaan peningkatan prtisipasi masyarakat
 - 475.54 Pembinaan kesehatan
 - 475.541 Penyediaan sarana kesehatan dan KB
 - 475.542 Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
 - 475.543 Pendistribusian bantuan pangan
 - 475.55 Pembinaan rokhani
 - 475.551 Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
 - 475.552 Bimbingan adaptasi masyarakat
 - 475.553 Bimbingan pelaksanaan menumbuhkan interaksi sosial
 - 475.56 Pelayanan pos di daerah transmigrasi
 - 475.57 Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan
 - 475.58 Penilaian transmigran teladan
 - 475.59 Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
- 476 Keluarga berencana
 - 476.1 Alat kontrasepsi
 - 476.2 KB Lestari
 - 476.3 KB Mandiri
 - 476.4 Penyuluh lapangan KB (PLKB)
 - 476.5 Pos KB Desa
 - 476.6 Akseptor KB
 - 476.7 Asuransi peserta KB
 - 476.8 Beasiswa peserta KB
 - 477 Catatan Sipil
 - 477.1 Akte kelahiran / kematian
 - 477.2 Akte perkawinan / perceraian
 - 478 -
 - 479 -
- 480 MEDIA MASA**
- 481 Penerbitan dan Pemberitaan
 - 481.1 Penerbitan
 - 481.11 Surat kabar
 - 481.12 Majalah
 - 481.13 Buletin
 - 481.14 Klarifikasi berita
 - 481.15 Press Release
 - 481.16 Layanan Informasi/Leaflet
 - 481.17 Masukan Analisis Gubernur
 - 481.18 Jurnal mingguan ringkasan berita
 - 481.19 Jurnal mingguan Pendapatn Umum
 - 481.2 Liputan Media Massa
 - 481.21 Liputan Rutin
 - 481.22 Liputan Khusus
 - 481.221 Arus Lebaran
 - 481.222 Pemberangkatan dan Kepulangan Haji
 - 481.3 Pencabutan Surat Ijin
 - 481.31 Surat Kabar

- 481.32 Majalah
- 481.33 Buletin
- 481.4 Laporan dan hasil pemberitaan
 - 481.41 Surat kabar
 - 481.42 Majalah
 - 481.43 Buletin
 - 481.44 Kegiatan bidang
 - 481.45 Grafika
- 482 Media Elektronik
 - 482.1 RRI
 - 482.2 Non RRI
 - 482.3 ORARI
 - 482.4 R A P I
 - 482.5 T V R I
 - 482.6 TV swasta
 - 482.7 Film
- 483 Reklame
 - 483.1 Ketentuan Pemasangan
 - 483.2 Penerbitan
 - 483.3 Pameran Non Komersial
- 484 Kewartawanan
 - 484.1 Pembentukan Organisasi Profesi
 - 484.2 Terjadinya kasus penghinaan, pemukulan, penganiyaan terhadap wartawan
 - 484.3 Penyalahgunaan Profesi
 - 484.4 Bantuan kepada/dari Organisasi Profesi Wartawan
 - 484.5 Musyawarah Wartawan Indonesia
 - 484.6 Kebijakan Pimpinan Wartawan/Pendidikan Jurnalistik
 - 484.7 Temu Pers/Konferensi Pers
 - 484.8 Pers Tour
 - 484.9 Wawancara/Audiensi Wartawan
- 485 Penerangan
 - 485.1 Publikasi
 - 485.2 Pendirian Informasi Center
- 486 Peningkatan Kapasitas Bidang Infokom
 - 486.1 Training Foto Grafi
 - 486.2 Training Berita Jurnalistik
 - 486.3 Bintek Infokom
 - 486.4 Rakorda Infokom
 - 486.5 Rakor Pengendalian Kegiatan
- 487 Hubungan Antar Lembaga
 - 487.1 Organisasi Kemasyarakatan
 - 487.12 Wahana Komunikasi masyarakat / Pengaduan Masyarakat
 - 487.13 Bintek Pengurus LKM
 - 487.14 Bahan Informasi Cetak LKM
 - 487.15 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan media
 - 487.16 Pelatihan Motivator Kapa Narkoba
 - 487.17 Pembekalan LSM/upaya PPBN
 - 487.18 Bahan Informasi Sosialisasi PPBN
 - 487.2 Lembaga Pemerintah
 - 487.21 Pertemuan Bakohumas
 - 487.22 Pertemuan Kehumasan
 - 487.23 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
 - 487.3 Luar Negeri
 - 487.31 Promosi Luar Negeri
 - 487.32 Kunjungan Wartawan Asing

- 488 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
 - 488.1 Pembuatan foto Blow Up Slide
 - 488.2 Tayangan Udara tentang Kebijakan dan hasil Pembangunan
 - 488.21 Kran Info Grhadika
 - 488.22 Halo Gubernur/Bupati/Walikota
 - 488.23 Fokus Utama
 - 488.3 Pelayanan Informasi Melalui Feature
 - 488.4 Pelayanan Informasi Melalui Spot
 - 488.41 Televisi
 - 488.42 Radio
 - 488.5 Pelayanan Informasi Melalui Media Tradisional
 - 488.51 Karawitan
 - 488.52 Wayang kulit
 - 488.53 Guyon Maton
 - 488.6 Dialog Interaktif
 - 488.61 Televisi (TVRI), Nasional
 - 488.62 Radio
- 489 Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur / Bupati/Walikota
 - 489.1 Himpunan Naskah Sambutan
 - 489.2 Klasifikasi Naskah sambutan
 - 489.3 Himpunan Dialog Interaktif
 - 489.4 Himpunan Naskah Rubrik
 - 489.5 Himpunan Naskah Keynote Speaker
 - 489.6 Pembuatan Kolom Khusus hasil – hasil pembangunan
- 490 -
- 491 -
- 492 -
- 493 -
- 494 -
- 495 -
- 496 -
- 497 -
- 498 -
- 499 -

500 PEREKONOMIAN

- 500.1 Dewan Stabilisasi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Perizinan pada umumnya. Untuk perijinan sesuatu bidang, klasifikasi pada masalahnya
- 504 -
- 505 -
- 506 -
- 507 -
- 508 -
- 509 -

510 PERDAGANGAN

Klasifikasi disini : Tata niaga

- 510.1 Promosi perdagangan
 - 510.11 Pekan Raya
 - 510.12 Iklan
 - 510.13 Pameran
 - 510.14 Event - event
 - 510.15 Lomba - lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
 - 510.16 Pasar
 - 510.17 Pertokoan, kios, PKL

- 510.2 Pelelangan,distribusi
 - 510.21 Pemasaran Sembako
 - 510.22 Pemasaran hasil industri
 - 510.23 Penentuan harga pokok
- 510.3 Bina Usaha dan sarana perdagangan
 - 510.31 Rencana dan program kerja
 - 510.32 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
 - 510.33 Pelaksanaan teknis
 - 510.34 Pemantauan
 - 510.35 Evaluasi dan Pelaporan
- 510.4 Perijinan
 - 510.41 Penerbitan SIUP
 - 510.42 Perpanjangan
 - 510.43 Ijin Prinsip
 - 510.44 Rekomendasi
- 510.5 Perdagangan antar pulau
 - 510.51 Kerjasama bahan baku
 - 510.52 Industri pemasaran
 - 510.53 Kontak
- 510.6 Tera
 - 510.61 Tera Ulang Ukuran
 - 510.62 Takaran
 - 510.63 Timbangan
 - 510.64 Kalibrasi
 - 510.65 Cap tanda tera
 - 510.66 Biaya tera
- 510.7 Bantuan Peralatan
 - 510.71 Proposal
 - 510.72 Surat perjanjian/kontrak
 - 510.73 Serah terima
- 510.8 Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik
- 510.9 Kemetrolagian
 - 510.91 Standart Tingkat Tiga
 - 510.92 Standar Kerja Satuan Ukuran
 - 510.93 Ukuran Metrologi
 - 510.931 Peralatan
 - 510.932 Laboratorium Metrologi
 - 510.933 Tanki Ukur Mobil
 - 510.934 Meter Taxi
 - 510.935 KWH Meter
 - 510.936 S P B U
- 511 Pemasaran
 - 511.1 Sembilan bahan pokok. Tambahkan kode wilayah beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dan sebagainya
 - 511.2 Pasar
 - 511.3 Pertokoan, kaki lima, kios
 - 511.4 Pusat perbelanjaan
- 512 Ekspor
 - 512.1 Ekspor hasil industri
 - 512.2 Ijin ekspor
 - 512.3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
 - 512.4 Manajemen Perdagangan Internasional
 - 512.5 Ekspori Hasil Industri
 - 512.51 Kebijakan
 - 512.52 Pemasaran
 - 512.6 Pemeritahuan Ekspori Barang

- 512.7 Pengawasan Mutu Barang
- 512.8 Eksportir terdaftar
- 512.9 Evaluasi dan Pelaporan
- 513 Impor
 - 513.1 Ijin Import
 - 513.11 Pemberian Ijin
 - 513.12 Pengendalian Ijin
 - 513.2 Standart Mata Dagang Import
 - 513.3 Manajemen Perdagangan Internasional
 - 513.4 Kegiatan Import
 - 513.41 Pembinaan Import
 - 513.42 Pengendalian Import
 - 513.43 Pemantauan Import
 - 513.5 Faktor-faktor Pendukung
 - 513.6 Pengawasan Mutu barang Import
 - 513.7 Penyaluran kegiatan import
 - 513.71 Bahan Konsumsi
 - 513.72 Bahan baku
 - 513.73 Bahan Penolong
 - 513.8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
- 514 Perdagangan antar pulau
 - 514.1 Kerjasama Bahan Baku
 - 514.2 Industri Pemasaran
 - 514.3 Kontrak
- 515 Perdagangan Luar Negeri
 - 515.1 Pengembangan Potensi Luar Negeri
 - 515.11 Promosi dan Informasi
 - 515.12 Pameran
 - 515.13 Kerjasama
- 516 Pergudangan
 - Termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
 - 516.1 Peti Kemas
 - 516.2 Tangki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha perdagangan
- 518 Koperasi (Untuk BUUD, KUD lihat : 412.3 - 412.32)
 - 518.1 Bina Usaha Koperasi
 - 518.11 Koperasi Pertanian dan Perkebunan
 - 518.111 Koperasi Pertanian Tanaman Pangan
 - 518.112 Koperasi Perkebunan
 - 518.12 Koperasi Perikanan dan Peternakan
 - 518.121 Koperasi Perikanan
 - 518.122 Koperasi Peternakan
 - 518.13 Permodalan Koperasi
 - 518.131 Pemupukan Modal
 - 518.132 Pemanfaatan Modal
 - 518.133 Perbankan dan Asuransi
 - 518.134 Permodalan luar Koperasi
 - 518.135 Kredit Program Umum
 - 518.136 Kredit Program Khusus
 - 518.14 Distribusi dan jasa Koperasi
 - 518.141 Distribusi Bahan Pokok
 - 518.142 Distribusi Aneka Bahan
 - 518.143 Distribusi Kerjasama Niaga
 - 518.144 Jasa Angkutan
 - 518.145 Jasa Perumahan
 - 518.146 Aneka jasa

- 518.15 Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
 - 518.151 Koperasi Kelistrikan
 - 518.152 Koperasi Industri
 - 518.153 Koperasi Telekomunikasi
- 518.2 Bina Lembaga Koperasi
 - 518.21 Organisasi Koperasi
 - 518.211 Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
 - 518.212 Pemberian Badan Hukum Koperasi
 - 518.213 Penyelesaian Pembubaran Koperasi
 - 518.214 Perangkaan Koperasi
 - 518.215 Pengakuan Koperasi Sekolah
 - 518.216 Amalgamasi
 - 518.217 Tertib Organisasi Koperasi
 - 518.218 Penyelesaian Perselisihan/ Persengketaan
 - 518.219 Bimbingan Kesadaran Hukum
 - 518.22 Bina Hubungan Alat kelengkapan Organisasi Koperasi
 - 518.221 Rapat Anggota Koperasi
 - 518.222 Pengurus dan Badan Pemeriksa
 - 518.223 Hubungan dengan Dewan Koperasi Indonesia
 - 518.224 BPP KUD
 - 518.23 Bina Tata Laksana Koperasi
 - 518.231 Klasifikasi KUD
 - 518.232 Klasifikasi Koperasi Perkotaan
 - 518.233 Klasifikasi Koperasi Sekunder
 - 518.234 Klasifikasi KUD Mandiri
 - 518.24 Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
 - 518.241 Administrasi KUD
 - 518.242 Administrasi Koperasi Perkotaan
 - 518.243 Karyawan/Manager Koperasi
 - 518.244 Sumber daya manusia
 - 518.245 T K S T
 - 518.246 Penyaluran Alat Sekolah
 - 518.247 Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD
 - 518.25 Akuntansi
 - 518.251 Akuntansi KUD
 - 518.252 Akuntansi Koperasi Perkotaan
 - 518.253 Akuntansi Koperasi Sekunder
 - 518.26 Pengawasan Koperasi
 - 518.261 Pengawasan Koperasi Primer
 - 518.262 Pengawasan Koperasi Sekunder
 - 518.263 Koperasi Jasa Audit
 - 518.264 Kerjasama Kantor Akuntan
 - 518.27 Penyuluhan Koperasi
 - 518.271 Pembinaan Kader Koperasi
 - 518.272 Masyarakat Umum
 - 518.273 Forum Komunikasi
 - 518.274 Kelompok tani
 - 518.275 P K K L
 - 518.276 Penilaian Tingkat Nasional
- 518.3 U K M (Usaha Kecil Menengah)
 - 518.31 Pembinaan Usaha
 - 518.311 Pembinaan Usaha Kecil

- 518.312 Pembinaan Usaha Menengah
- 518.32 Kredit Usaha
 - 518.321 Kredit Usaha Kecil
 - 518.322 Kredit Usaha Menengah
- 518.33 Pengawasan Usaha
 - 518.331 Pengawasan Usaha Kecil
 - 518.332 Pengawasan Usaha Menengah

519 -

520 PERTANIAN

- 521 Tanaman Pangan
 - 521.1 Rencana dan Program
 - 521.11 Bimas/Inmas termasuk Kredit
 - 521.12 Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
 - 521.2 Produksi
 - 521.21 Padi
 - 521.211 Sawah
 - 521.212 G o g o
 - 521.213 Huma
 - 521.22 Palawija
 - 521.221 Kacang
 - 521.222 Jagung
 - 521.223 Ketela Pohon
 - 521.224 Ubi-ubian
 - 521.225 Kedelai
 - 521.23 Hortikultura
 - 521.24 Sayuran
 - 521.25 Buah - buahan
 - 521.26 Tanaman Hias
 - 521.27 Perlebahan
 - 521.28 Panen Gagal (Puso)
 - 521.3 Sarana Usaha Pertanian
 - 521.31 Peralatan
 - 521.32 Meliputi traktor dan sebagainya
 - 521.33 Pembibitan
 - 521.34 Pupuk
 - 521.35 Irigasi Pertanian
 - 521.36 Rehabilitasi Lahan Pertanian
 - 521.4 Perlindungan Tanaman
 - 521.41 Penyakit
 - 521.411 Penyakit Daun
 - 521.412 Penyakit Batang
 - 521.413 Penyakit Buah
 - 521.42 Hama
 - 521.421 Hama Serangga, diklasifikasikan :
Wereng, Walang sangit , Tungro
 - 521.422 Hama Tikus dan Sejenisnya
 - 521.43 Pemberantasan
 - 521.44 Pestisida
 - 521.5 Tanah Pertanian Pangan
 - 521.51 Persawahan
 - 521.52 Perladangan
 - 521.53 K e b u n
 - 521.6 Pengusaha, Petani
 - 521.7 Lahan Kritis / KTA
 - 521.8 Pemasaran
 - 521.81 Promosi
 - 521.9 Pengembangan Sumber Daya pertanian

- 522 Kehutanan
 - 522.1 Perencanaan Hutan
 - 522.11 Survey
 - 522.111 Survey PPA
 - 522.112 Survey Areal
 - 522.113 Survey Pembinaan Hutan
 - 522.114 Survey Potensi Hutan
 - 522.12 Pendataan Areal
 - 522.121 Data Areal Tata Guna Hutan
 - 522.122 Data Areal Konservasi
 - 522.2 Tata Guna Hutan
 - 522.21 Tata Kawasan
 - 522.211 Pengurusan Kawasan Kutan
 - 522.212 Penafsiran Hutan
 - 522.213 Mutasi Hutan
 - 522.22 Tata Hutan
 - 522.221 Tata Hutan Sementara
 - 522.222 Tata Hutan Tetap
 - 522.223 Pembukaan Hutan
 - 522.23 Ukur dan Pemetaan
 - 522.231 Pengukuran
 - 522.232 Perpetaan
 - 522.3 Pengusahaan Hutan
 - 522.31 Data Areal HPH
 - 522.311 Areal HPH
 - 522.312 SKHPH
 - 522.313 Kerjasama
 - 522.314 Pembatalan/Penolakan
 - 522.32 Modal dan Peralatan
 - 522.321 Inventarisasi Logging
 - 522.322 Inventarisasi Industri
 - 522.323 Peralatan
 - 522.324 Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
 - 522.325 Pemegang Saham
 - 522.326 Neraca Perusahaan
 - 522.33 Rencana Kerja
 - 522.331 KHPH
 - 522.332 RKPH
 - 522.333 Rencana Karya Lima Tahun RKPH
 - 522.34 Perpanjangan HPH
 - 522.341 Ijin Tebang
 - 522.35 Produksi
 - 522.351 Target Produksi
 - 522.352 Produksi Kayu
 - 522.353 Produksi Non Kayu
 - 522.36 Industri
 - 522.361 Industri Kayu HPH
 - 522.362 Industri Kayu Non HPH
 - 522.363 Industri Non Kayu
 - 522.37 Pembinaan HPH
 - 522.371 Pelanggaran dan Sanksi
 - 522.38 Pembangunan Hutan Tanaman Industri
 - 522.381 Hutan Tanaman Industri Pulp
 - 522.382 HTI Pertukangan
 - 522.39 Iuran Hutan
 - 522.4 Sarana Usaha
 - 522.41 Standarisasi
 - 522.411 Kayu

- 522.412 Non Kayu
- 522.42 Pengujian Hasil Hutan
- 522.43 Pengembangan
 - 522.431 Pengembangan Perusahaan
 - 522.432 Pengembangan Pemasaran
- 522.44 Pemasaran Hasil Hutan
- 522.45 Angkutan Hasil Hutan
 - 522.451 Sarana dan Prasarana
 - 522.452 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
- 522.46 Tata Usaha Hasil Hutan
- 522.5 Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
 - 522.51 Konservasi Jenis
 - 522.511 Satwa yang dilindungi
 - 522.512 Satwa yang tidak dilindungi
 - 522.513 Lembaga Konservasi Satwa
 - 522.514 Lembaga Konservasi Tumbuhan
 - 522.52 Kawasan Konservasi
 - 522.521 Cagar Alam (termasuk laut)
 - 522.522 Suaka Margasatwa
 - 522.523 Taman Wisata (termasuk laut)
 - 522.524 Taman Nasional
 - 522.525 Taman Hutan Raya
 - 522.526 Taman Baru
 - 522.527 Hutan Lindung
 - 522.53 Pengkajian Lingkungan
 - 522.531 Amdal UKL,UPL di dalam Kawasan hutan
 - 522.532 Amdal UKL, UPL di luar Kawasan Hutan
 - 522.54 Bina Cinta Alam
 - 522.541 Kelompok Pecinta Alam
 - 522.542 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
 - 522.543 Penyuluh Konservasi Sumber Daya Alam
 - 522.544 LSM Lingkungan
 - 522.55 Pengamanan hutan
 - 522.551 Jaga Wana
 - 522.552 PPNS
 - 522.553 Gangguan Keamanan Hutan
 - 522.554 Bencana Alam
 - 522.555 Kebakaran hutan
 - 522.556 Sengketa Hutan
 - 522.557 Hama dan penyakit
 - 522.558 Pestisida dan pupuk Tanaman Hutan
 - 522.559 Alat dan Mesin Kehutanan
- 522.6 Reboisasi dan rehabilitasi Hutan
 - 522.61 Pembenihan
 - 522.611 Tegakan Benih
 - 522.612 Pengadaan benih
 - 522.613 Pengujian dan penyimpanan Benih
 - 522.614 Lalu lintas Angkutan Benih
 - 522.615 Pembibitan
 - 522.616 Pengada dan Pengedar bibit Bersertifikat

- 522.617 Pengada dan pengedar Bibit Tidak Bersertifikat
- 522.62 Tanaman Reboisasi
 - 522.621 Lahan Kritis
 - 522.622 Reboisasi Lahan HPH
 - 522.623 Rehabilitasi Tanah Hutan
 - 522.624 Konservasi Tanah dan air
 - 522.625 Pengendalian Perladangan
 - 522.626 Penghijauan
 - 522.627 Aneka Usaha kehutanan
- 522.63 Perhutanan Sosial
 - 522.631 Sutera alam
 - 522.632 Minyak Kayu putih
 - 522.633 Perlebahan
- 523 Perikanan dan Kelautan
 - 523.1 Rencana dan program
 - 523.11 Penyuluhan
 - 523.12 Teknologi
 - 523.2 Produksi Perikanan
 - 523.21 Pelelangan
 - 523.22 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
 - 523.3 Usaha Perikanan
 - 523.31 Pembibitan
 - 523.32 Daerah Penangkapan
 - 523.33 Perizinan Pembudidayaan Ikan
 - 523.4 Pemasaran
 - 523.41 Ekspor Komoditas perikanan
 - 523.5 Sarana Perikanan
 - 523.51 Peralatan
 - 523.52 Kapal
 - 523.53 Pelabuhan
 - 523.6 Pengendalian Hama dan Penyakit
 - 523.7 Pengusaha, Nelayan
 - 523.71 Kapal/Motor Boat
 - 523.72 Jaring
 - 523.73 Cold Storage
 - 523.74 Tempat es
 - 523.8 Konservasi dan suaka laut
- 524 Peternakan
 - 524.1 Produksi
 - 524.11 Susu Ternak Rakyat
 - 524.12 Telor
 - 524.13 Daging
 - 524.2 Sarana Usaha Peternakan
 - 524.21 Pembibitan
 - 524.22 Obat Hewan
 - 524.23 Alsinak
 - 524.24 Pakan
 - 524.3 Kesehatan Hewan
 - 524.31 Penyakit hewan
 - 524.32 Pos Kesehatan Hewan
 - 524.33 Pemeriksaan Spesimen
 - 524.34 Karantina
 - 524.4 Pelayanan Usaha dan pemasaran
 - 524.41 Promosi produksi Peternakan
 - 524.42 Pemasaran peternakan
 - 524.43 Ijin Usaha peternakan

- 524.5 Pengawasan dan Standarisasi
 - 524.51 Rumah potong Hewan
 - 524.52 Laboratorium
 - 524.53 Standarisasi Bibit Ternak
- 524.6 Pengembangan Peternakan
 - 524.61 Inseminasi buatan
 - 524.62 Pembibitan
 - 524.63 Kawasan peternakan
 - 524.64 Penyebaran Ternak
- 524.7 Data dan informasi
 - 524.71 Data peternakan
 - 524.72 Informasi peternakan
- 524.8 Organisasi Peternakan
 - 524.81 Asosiasi Peternakan
 - 524.82 Kelompok Tani ternak
- 525 Perkebunan
 - 525.1 Rencana dan Program
 - 525.2 Produksi
 - 525.21 Karet
 - 525.22 T e h
 - 525.23 Tembakau
 - 525.24 T e b u
 - 525.25 Cengkeh
 - 525.26 Kelapa/Kopra/Kelapa Sawit
 - 525.27 K o p i
 - 525.28 Aneka Tanaman
 - 525.3 Usaha Perkebunan
 - 525.31 Pembibitan
 - 525.4 Perlindungan Tanaman
 - 525.41 Hama
 - 525.42 Pestisida
 - 525.43 Pupuk
 - 525.5 Alat dan Mesin Perkebunan
 - 525.6 Pengolahan lahan
 - 525.61 Terasering
- 526 Ketahanan pangan
 - 526.1 Program Bimbingan Massal
 - 526.2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
 - 526.21 Pembinaan Teknologi
 - 526.22 Sarana Produksi dan permodalan
 - 526.23 Kelembagaan
 - 526.3 Agribisnis
 - 526.31 Mutu Hasil
 - 526.32 Pengelolaan Hasil Pangan
 - 526.33 Pemasaran Hasil
 - 526.34 Kemitraan
 - 526.4 Distribusi pangan
 - 526.41 Sistem dan Pola distribusi
 - 526.42 Sarana dan Prasarana Distribusi
 - 526.43 Pengadaan dan Cadangan pangan
 - 526.5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman pangan
 - 526.51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
 - 526.52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
 - 526.53 Sistem Informasi Pangan
- 527 -
- 528 -
- 529 -

530 PERINDUSTRIAN

- 530.1 Undang - undang Gangguan
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin/Elektronik
- 533 Industri Kimia/Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan/Minuman
- 536 Aneka Industri/Perusahaan
 - 536.1 Home Industri
- 537 Aneka kerajinan
 - 537.1 Kerajinan Rakyat
- 538 Usaha Negara
 - 538.1 Perjan
 - 538.2 Perum
 - 538.3 Persero
- 539 Perusahaan Daerah

540 PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN

- 541 Minyak bumi/bensin
 - 541.1 Pengusahaan
 - 541.11 Eksploitasi
 - 541.12 Kontrak kerja
 - 541.13 Pengolahan
 - 541.2 Penyaluran
 - 541.3 Tangki, Pompa, Tanker
- 542 Gas Bumi
- 543 Logam Mulia
 - Intan, Emas, Perak
- 544 Logam
 - 544.1 Timah
 - 544.2 Alumunium, Boxit
 - 544.3 Besi, termasuk Besi Tua
 - 544.4 Tembaga
- 545 Aneka Tambang/Bahan Galian
 - 545.1 Air permukaan
 - 545.2 Air Bawah tanah
 - 545.21 Perijinan
 - 545.211 Sumur Artetis
 - 545.212 Sumur Bor
 - 545.213 Sumur Gali/Pasak
 - 545.214 Mata Air
 - 545.215 Pengusaha,Pengebor (APPATINDO)
 - 545.22 Sumur Pantau
 - 545.23 Pemasangan/Penyegelan Water Meter
 - 545.24 Produksi/Nilai Perolehan Air (NPA)
 - 545.25 Pengawasan, Pengendalian, pembinaan
- 546 Geologi
 - 546.1 Vulkanologi
 - 546.11 Pengawasan Gunung Berapi
 - 546.2 Sumber daya Mineral
 - 546.3 Volkanologi
 - 546.31 Pengawasan Gunung Merapi
 - 546.32 Panas Bumi
 - 546.4 Hidrogeologi
 - 546.5 Gerakan Tanah (Longsoran, Amblesan)
 - 546.6 Pengawasan, Pengendalian
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamudraan
- 549 -

550 PERHUBUNGAN

- 551 Perhubungan Darat
 - 551.1 Lalu Lintas jalan raya, Sungai, Danau
 - 551.11 Keamanan lalu lintas, rambu-rambu
 - 551.12 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
 - 551.13 Kecelakaan Lalu Lintas
 - 551.2 Angkutan Jalan Raya
 - 551.21 Perizinan
 - 551.22 Terminal
 - 551.23 Alat Angkutan
 - 551.24 Jembatan Timbang/Lebih Muatan
 - 551.25 Uji Mutu
 - 551.3 Angkutan Sungai
 - 551.31 Keselamatan, Rambu-rambu
 - 551.32 Lalu Lintas
 - 551.33 Alur dan Kolam Pelabuhan
 - 551.34 Trayek
 - 551.35 Sarana / Kapal
 - 551.36 Pelabuhan
 - 551.37 Terminal
 - 551.38 Kecelakaan
 - 551.39 Perizinan
 - 551.4 Angkutan Danau
 - 551.41 Keselamatan, Rambu-rambu
 - 551.42 Lalu Lintas
 - 551.43 Alur dan Kolam Pelabuhan
 - 551.44 Trayek
 - 551.45 Sarana / Kapal
 - 551.46 Pelabuhan
 - 551.47 Terminal
 - 551.48 Kecelakaan
 - 551.49 Perizinan
 - 551.5 F e r i
 - 551.51 Sarana dan Prasarana / Kapal
 - 551.52 Terminal
 - 551.53 Pelabuhan
 - 551.54 Trayek
 - 551.55 Angkutan Penumpang, Angkutan Barang
 - 551.56 Keselamatan
 - 551.57 Kecelakaan
 - 551.58 Perawatan/Perbaikan
 - 551.59 Perizinan
 - 551.6 Perkereta - Apian
 - 551.61 Sarana, meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie
 - 551.62 Prasarana (Jalan/Jembatan)
 - 551.63 Trayek
 - 551.64 Angkutan Penumpang
 - 551.65 Angkutan Barang
 - 551.66 Keselamatan
 - 551.67 Kecelakaan
 - 551.68 Perawatan/Perbaikan
 - 551.69 Perizinan
- 552 Perhubungan Laut
 - 552.1 Lalu Lintas Angkutan laut
 - 552.11 Pelayaran Dalam Negeri
 - 552.12 Pelayaran Luar Negeri
 - 552.13 Pelayaran Haji
 - 552.14 Pelayaran Charter/Wisata Turis

- 552.15 Pelayaran Khusus
- 552.16 Keamanan lalu lintas, Rambu-rambu
- 552.2 Perkapalan - Alat Angkutan
 - 552.21 Kapal Penumpang
 - 552.22 Kapal barang
 - 552.23 Kapal Perang/Patroli/Negara
 - 552.24 Kapal Tanker
 - 552.25 Ponton/Tongkang
 - 552.26 Kapal Layar
 - 552.27 Kapal Layar Motor
 - 552.28 Kapal Kontainer
- 552.3 Pelabuhan
 - 552.31 Tanah/Lokasi
 - 552.32 Alur Layar
 - 552.33 Dermaga
 - 552.34 Terminal Penumpang
 - 552.35 Terminal Kontainer
 - 552.36 Bangunan/Gedung/Gudang
 - 552.37 Perlengkapan Tambat Labuh
 - 552.38 Lapangan Penumpukan
 - 552.39 Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus
- 552.4 Pengerukan/perawatan
 - 552.41 Alur Pelayaran
 - 552.42 Kolam pelabuhan
 - 552.43 Reklamasi Pantai
 - 552.44 Dumping Area
 - 552.45 Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
- 552.5 Penjagaan Pantai
 - 552.51 Patroli Bandar
 - 552.52 Patroli Perairan
 - 552.53 Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
- 552.6 Angkutan Barang
 - 552.61 P o s
 - 552.62 Minyak
 - 552.63 L o g
 - 552.64 Ternak
 - 552.65 Sembilan Bahan Pokok
 - 552.66 Peti Kemas/EMKL
 - 552.67 Muatan Umum
 - 552.68 Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
 - 552.69 Bongkar Muat
- 552.7 Keselamatan
 - 552.71 Rambu - rambu/Mercusuar
 - 552.72 Kelaikan Kapal/Pembangunan Kapal
 - 552.73 Fasilitas Keselamatan/Keamanan
 - 552.74 Telekomunikasi Pelayaran
 - 552.75 Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
 - 552.76 Sertifikasi Awak Kapal
- 552.8 Kecelakaan Gangguan
 - 552.81 Kecelakaan Penumpang/Kapal
 - 552.82 Kecelakaan Barang
 - 552.83 Gangguan Sarana/Prasarana
 - 552.84 Pembajakan/Penyelundupan
 - 552.85 Pencemaran
- 552.9 Perijinan
 - 552.91 Ijin Berlayar
 - 552.92 Ijin Pekerjaan Bawah Air

- 552.93 Ijin pembuatan dan perubahan bentuk kapal
- 552.94 Ijin Pembukaan Kantor Cabang
- 552.95 Ijin Usaha Angkutan Laut
- 552.96 Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
- 552.97 Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
- 552.98 Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
- 552.99 Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
- 553 Perhubungan Udara
 - 553.1 Perhubungan Udara
 - 553.11 Lalu Lintas Angkutan Udara
 - 553.12 Penerbangan Domestik
 - 553.13 Penerbangan Luar Negeri
 - 553.14 Penerbangan Haji
 - 553.15 Penerbangan Charter/Non Reguler
 - 553.16 Penerbangan Khusus/Jembatan Udara
 - 553.2 Pelabuhan Udara
 - 553.21 Tanah/Lokasi
 - 553.22 Landasan
 - 553.23 Apron
 - 553.24 Terminal Penumpang
 - 553.25 Terminal Cargo
 - 553.26 Bangunan/Gedung
 - 553.27 Perlengkapan
 - 553.28 Parkir Kendaraan
 - 553.3 Alat Angkutan
 - 553.31 Pesawat Udara
 - 553.32 Helikopter
 - 553.4 Angkutan Barang
 - 553.41 P o s
 - 553.42 Muatan Dalam Negeri
 - 553.43 Muatan Luar Negeri
 - 553.44 E M P U
 - 553.5 Sertifikasi kelaikan
 - 553.51 Kelaikan Pesawat Udara
 - 553.52 Kelaikan Peralatan Penunjang
 - 553.53 Kelaikan Personil/Awak Kapal
 - 553.6 Keselamatan
 - 553.61 Rambu - Rambu
 - 553.62 Perakitan/ Kalibrasi
 - 553.63 Fasilitas Keselamatan
 - 553.64 Telekomunikasi Penerbangan
 - 553.7 Kecelakaan/Gangguan
 - 553.71 Kecelakaan penumpang
 - 553.72 Kecelakaan Barang
 - 553.73 Gangguan sarana/prasarana
 - 553.74 Pembajakan
 - 553.75 Pencemaran
 - 553.8 Umum
 - 553.81 Asuransi
 - 553.82 Asosiasi
 - 553.83 SATPAM
 - 553.84 Rally Udara/Lomba
 - 553.9 Perizinan
 - 553.91 Izin Terbang/Flight Approval
 - 553.92 Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan/EMPU
 - 553.93 Pembukaan Kantor Cabang
 - 553.94 Rekomendasi Ketinggian Bangunan

- 553.95 Pembangunan Bandar Udara Khusus
- 554 P O S
 - 554.1 Pembinaan
 - 554.11 Kebutuhan Fasilitas
 - 554.12 Rehabilitas/Perawatan
 - 554.13 Bina Usaha/Pengawasan/Penertiban
 - 554.14 Standarisasi Perangkat
 - 554.15 Tanah/Bangunan
 - 554.16 Filateli
 - 554.17 Asosiasi
 - 554.18 Laporan dan Evaluasi
 - 554.2 Pelayanan
 - 554.21 Jasa Pos
 - 554.22 Jasa Titipan
 - 554.23 Jasa Giro
 - 554.24 Benda Pos/Perangko
 - 554.25 Sampul Peringatan
 - 554.26 Jasa Pos Elektronik
 - 554.3 Perijinan
 - 554.31 Rekomendasi Jasa Pos/Titipan
 - 554.32 Pembukaan Agen/Cabang
 - 554.4 Gangguan Sarana dan Prasarana
 - 554.41 Kecelakaan
 - 554.42 Sabotase
 - 554.43 Penyelundupan
- 555 Telekomunikasi
 - 555.1 Telepon
 - 555.11 Tetap
 - 555.12 Bergerak
 - 555.13 Wartel
 - 555.14 IKR/G
 - 555.2 U S O
 - 555.3 Telegram, Telex/SSB
 - 555.4 Satelit
 - 555.5 Stasiun Bumi
 - 555.6 Frekwensi dan Informatika
 - 555.61 Faximile
 - 555.62 Amatir Radio
 - 555.63 KRAP
 - 555.64 Radio Siaran Lokal
 - 555.65 Televisi Siaran Lokal
 - 555.66 Radio Konsesi Lokal
 - 555.67 Radio Base Station
 - 555.68 ISPU (Internet Service Providen)
 - 555.69 Warnet
 - 555.7 Pembinaan/Penertiban/Pengawasan
 - 555.71 Wartel
 - 555.72 Frekuensi Radio Lokal
 - 555.8 Standarisasi Perangkat Telekomunikasi
 - 555.9 Perizinan
 - 555.91 Amatir Radio
 - 555.92 K R A P
 - 555.93 Radio Siaran Lokal
 - 555.94 Televisi Siaran Lokal
 - 555.95 Radio Konsesi lokal
 - 555.96 Radio Base Station
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
 - 556.1 Usaha Pariwisata

- 556.11 Usaha Jasa Pariwisata
 - 556.111 Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
- 556.12 Izin Usaha Obyek dan atraksi Wisata
- 556.13 Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata
- 556.14 Usaha sarana pariwisata
 - 556.141 Ijin Pariwisata
 - 556.142 Ijin Usaha Pariwisata
 - 556.143 Ijin Usaha Jasa Pariwisata
 - 556.144 Ijin Pengusahaan obyek dan Daya tarik Wisata
 - 556.145 Ijin Usaha Sarana
- 556.15 Wisatawan
 - 556.151 Wisatawan Nusantara
 - 556.152 Wisatawan Mancanegara
- 556.16 Promosi dan Informasi Pariwisata
 - 556.161 Dalam Negeri
 - 556.162 Luar Negeri
- 556.2 Perhotelan
 - 556.21 Status Hotel
 - 556.22 Kelas Hotel
 - 556.23 Tarif
- 556.3 Travel Service
 - 556.31 Pramuwisata
 - 556.32 Biro perjalanan/Angkutan Wisata
 - 556.33 Souvenir
 - 556.34 Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
- 556.4 Tempat Rekreasi
 - 556.41 Obyek dan daya tarik wisata
 - 556.411 Ciptaan Tuhan
 - 556.412 Hasil Karya Manusia
 - 556.42 Rehabilitasi/Perawatan
 - 556.43 Pengembangan Fasilitas
 - 556.44 Tanah/Bangunan
 - 556.45 Bina Usaha
 - 556.46 Institusi
 - 556.461 Asosiasi
 - 556.462 Lembaga Kepariwisata
- 557 Metereologi
 - 557.1 Curah hujan
 - 557.2 Hujan Buatan
 - 557.3 Peneropongan Bintang
 - 557.4 Prakiraan Cuaca
- 558 -
- 559 -
- 560 TENAGA KERJA**
 - 560.1 Data Pengangguran
 - 560.2 Data permintaan TKI/TKW dari Luar Negeri
 - 560.11 Data Persediaan TKI/TKW dari Daerah
 - 560.3 Job Order TKI ke Luar Negeri oleh PJTKI
 - 560.4 Rekrutmen Calon TKI/TKW
 - 560.5 Seleksi Naker ke luar negeri
 - 560.51 Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW
 - 560.52 Berkas persyaratan Calon TKI/TKW
 - 560.53 Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW
 - 560.6 Persyaratan Naker TKI/TKW
 - 560.61 Permohonan Rekomendasi Passport

- 560.62 Perjanjian Kerja TKI/TKW
- 560.63 Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
- 560.64 Permohonan Fiskal ke Luar Negeri
- 560.65 Pelatihan TKI/TKW
- 560.7 Pemberangkatan Naker
 - 560.71 Pemberangkatan ke Luar Negeri
 - 560.72 Pembekalan akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri
 - 560.73 Berita Acara serah Terima TKI/TKW
- 560.8 Pemulangan Naker
 - 560.81 Kepulangan TKI/TKW karena kontraknya habis
 - 560.82 Pemulangan TKI/TKW Ilegal
 - 560.83 TKI/TKW terkena kasus pidana
- 561 Gaji/Upah
 - 561.1 Kegiatan dan hasil sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional
 - 561.2 Permohonan Penangguhan pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Provinsi
 - 561.3 Kebutuhan Fisik Minimum
 - 561.4 Perhitungan Upah Kerja (Termasuk didalamnya upah lembur)
 - 561.5 Laporan Data Remittance
 - 561.6 Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
- 562 Penempatan Tenaga Kerja
 - 562.1 Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
 - 562.11 Penempatan Naker Mandiri profesional (TKMP)
 - 562.12 Penempatan Naker Non terdidik dan Non Profesional
 - 562.13 Pengembangan Kesempatan Berusaha/Perluasan Kerja
 - 562.2 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
 - 562.3 Lembaga Penyalur Naker
 - 562.31 Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)
 - 562.32 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
 - 562.33 Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI,BKK,BKS)
- 563 Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja
 - 563.1 Pendidikan Pekerja
 - 563.11 Pendidikan dan latihan Kerja
 - 563.12 Diklat di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
 - 563.13 Diklat di Luar Negeri (Pemagangan)
 - 563.2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
 - 563.21 Tempat Pelatihan (BLK)
 - 563.22 Instruktur/Pelatih
 - 563.23 Modul/Silabus dan Bahan Praktek
 - 563.24 Kurikulum dan Metode pengajaran
 - 563.25 Sertifikat
 - 563.3 Kerjasama Pelatihan tenaga kerja
- 564 Tenaga Sukarela
 - 564.1 Butsi
 - 564.2 Padat Karya
- 565 Perselisihan Tenaga Kerja
 - 565.1 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker

- 565.11 Pengaduan perkara Perburuhan/NAKER
- 565.12 Pemeriksaan Perkara perburuan/NAKER
- 565.13 Penyelidikan dan Penyidikan perkara Perburuan/NAKER
- 565.14 Sidang perkara perselisihan perburuhan/NAKER
- 565.15 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan perburuhan (NAKER)
- 565.16 Peninjauan Kembali hasil Putusan Sidang KP2K (P4D/P4P)
- 565.17 Permintaan Eksekusi terhadap hasil Keputusan KP2K (P4D/P4P)
- 565.18 Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (P4D/P4P)
- 565.2 Pemogokan/Unjuk Rasa tenaga Kerja
- 566 Keselamatan Kerja
 - 566.1 Instalasi Proteksi Kebakaran
 - 566.2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
 - 566.3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
 - 566.4 Pengangkatan dan pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 566.5 Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
 - 566.6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
 - 566.7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
 - 566.8 Perlengkapan Sarana Kerja
 - 566.81 Pemasangan dan pemakaian Lift (Pesawat angkat/angkut)
 - 566.82 Pemasangan dan pemakaian Pesawat Uap (Ketel uap)
 - 566.83 Pemasangan dan pemakaian Motor Diesel
 - 566.84 Pemasangan dan pemakaian tanki tak bertekanan
 - 566.85 Pemasangan dan pemakaian alat pemadam Kebakaran
 - 566.9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (sip malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
 - 567.1 Pengaduan PHK sepihak
 - 567.2 PHK Masal
 - 567.3 Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK
 - 567.4 Ijin melakukan PHK
 - 567.5 Penghitungan masa kerja bagi Pekerja yang di PHK
 - 567.6 Pemberian uang tunggu bagi Pekerja yang di PHK
 - 567.7 Pemberian uang pesangon bagi Pekerja yang di PHK
- 568 Kesejahteraan Buruh
 - 568.1 Bantuan Kredit/Bantuan Modal Kerja Bagi naker
 - 568.11 Pemilihan Pekerja Teladan
 - 568.2 Perumahan Pekerja
 - 568.3 Keikutsertaan Pekerja dalam program Jamsostek
 - 568.4 Koperasi Pekerja
 - 568.5 Sarana Transportasi Pekerja
 - 568.6 Perpustakaan Pekerja
 - 568.7 Tempat Ibadah Pekerja
 - 568.8 Rekreasi dan olah raga pekerja
 - 568.9 Pendirian, pendaftaran, dan kegiatan Organisasi Pekerja
 - 568.91 Lembaga kerjasama Bipartid

- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
 - 569.1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
 - 569.2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - 569.3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
 - 569.4 Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
 - 569.5 Data Tenaga Kerja Asing
 - 569.6 Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
 - 569.7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
 - 569.8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
 - 569.9 Tenaga Kerja Asing Ilegal

570 PERMODALAN

- 570.1 Kerjasama penanaman Modal Antar Provinsi
- 570.2 Kerjasama Penanaman Modal Antar Kabupaten
- 571 Modal Domestik
- 572 Modal Asing
- 573 Modal Patungan (joint Venture)/ Penyertaan Modal
- 574 Pasar Uang dan Modal
- 575 Saham
- 576 -
- 577 -
- 578 -
- 579 -

580 PERBANKAN MONETER

- 581 Kredit
- 582 Investasi
- 583 Tabungan
 - 583.1 Deposito
 - 583.2 Tabanas
 - 583.3 Taska
 - 583.4 Tapelpram
 - 583.5 Tabungan Lainnya
- 584 Bank pembangunan Daerah
- 585 Asuransi
 - 585.1 Dana Kecelakaan Lalu Lintas
 - 585.2 Polis
 - 585.3 Premi
 - 585.4 Tertanggung/pemegang polis
 - 585.5 Uang pertanggungan
- 586 Alat pembayaran
 - Check, giro wesel, tranfer
- 587 Fiscal
- 588 Hutang Negara Obligasi
- 589 Moneter

590 AGRARIA

- 591 Tata Guna Tanah
 - 591.1 Pemetaan dan pengukuran
 - 591.2 Perpetaan
 - 591.3 Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
 - 591.4 Fakta Tata Guna Tanah
 - 591.5 Tanah Kritis
- 592 Landreform
 - 592.1 Redistribusi
 - 592.11 Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah Pertanian
 - 592.12 Penentuan Tanah Obyek Landreform
 - 592.13 Pembagian Tanah Obyek Landreform

- 592.14 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
- 592.2 Ganti Rugi
 - 592.21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - 592.22 Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - 592.23 Ganti Rugi Tanah Absente
 - 592.24 Sengketa Ganti Rugi Tanah Absente
 - 592.25 Ganti Rugi tanah partikelir
 - 592.36 Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
- 592.3 Bagi Hasil
 - 592.31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
 - 592.32 Pelaksanaan perjanjian bagi Hasil
 - 592.33 Sengketa perjanjian Bagi Hasil
- 592.4 Gadai Tanah
 - 592.41 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai tanah
 - 592.42 Pelaksanaan Gadai Tanah
 - 592.43 Sengketa Gadai Tanah
- 592.5 Bimbingan dan penyuluhan
- 592.6 Pengembangan
- 592.7 Yayasan Dana Landreform (Y D L)
- 593 Pengurusan Hak - hak Tanah
 - 593.1 Penyusunan Program dan Bimbingan teknis
 - 593.11 Sewa tanah
 - 593.111 Sewa tanah untuk tanaman tertentu :Tebu,Tembakau, Rosela,Corchorus
 - 593.2 Hak Milik
 - 593.21 Perorangan
 - 593.22 Badan Hukum
 - 593.3 Hak pakai
 - 593.31 Perorangan
 - 593.311 Warga Negara Indonesia
 - 593.312 Warga Negara Asing
 - 593.32 Badan Hukum
 - 593.321 Badan Hukum Indonesia
 - 593.322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsultan, Kantor Dagang Asing
 - 593.33 Tanah Gedung-gedung Negeri
 - 593.4 Guna Usaha
 - 593.41 Perkebunan Besar
 - 593.42 Perkebunan Rakyat
 - 593.43 Peternakan
 - 593.44 Perikanan
 - 593.45 Kehutanan
 - 593.5 Hak Guna Bangunan
 - 593.51 Perorangan
 - 593.52 Badan Hukum
 - 593.53 P3MB (Panitia Pelaksana Pengusahaan Milik Belanda)
 - 593.54 Badan Hukum Asing Belanda - PBK No. 5/65
 - 593.55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960)
 - 593.6 Hak Pengelolaan
 - 593.61 PN Perumnas, Bonded Ware House,Industrial Estate, Real Estate
 - 593.62 Perusahaan Daerah Pembangunan perumahan
 - 593.7 Sengketa tanah
 - 593.71 Peradilan Perkara tanah (Lihat Juga 183)
 - 593.8 Pencabutan dan pembebasan Tanah

- 593.81 Pencabutan Hak
- 593.82 Pembebasan Tanah
- 593.83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
 - 594.1 Pengukuran / Pemetaan
 - 594.11 Fotogrametri
 - 594.12 Terristris
 - 594.13 Triangulasi
 - 594.14 Peralatan
 - 594.2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No.6/1960)
 - 594.3 Sertifikat
 - 594.4 Pejabat Pembuat Akte Tanah
- 595 Transmigrasi
 - 595.1 Tata Guna Tanah
 - 595.2 Landreform
 - 595.3 Pengurusan Hak - hak Tanah
 - 595.4 Pendaftaran Tanah
- 596 -
- 597 -
- 598 -
- 599 -

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

- 601 Tata bangunan konstruksi, industri konstruksi
- 602 Pengadaan Barang dan Jasa
 - 602.1 Lelang
 - 602.11 Umum
 - 602.12 Terbatas
 - 602.1 Pemilihan Langsung
 - 602.3 Penunjukan Langsung
 - 602.4 Daftar Rekanan Mampu
 - 602.5 Tanda Daftar Rekanan
 - 602.6 Kontraktor, Pemborong
 - 602.7 T e n d e r
- 603 Arsitektur
- 604 Bahan Bangunan
 - 604.1 Tanah dan Batu
 - 604.2 A s p a l
 - 604.3 Besi dan logam lainnya
 - 604.31 Besi beton
 - 604.32 Besi profil (konstruksi)
 - 604.33 Paku
 - 604.34 Alumunium Profil
 - 604.4 Bahan-bahan pelindung dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu)
 - 604.5 S e m e n
 - 604.6 K a y u
 - 604.7 Bahan penutup atap
 - 604.8 Alat-alat penggantung dan pengunci
 - 604.9 Bahan-bahan bangunan lainnya
- 605 Instalansi
 - 605.1 Instalansi bangunan
 - 605.2 Instalansi listrik
 - 605.3 Instalansi air/sanitasi
 - 605.4 Instalansi pengatur udara
 - 605.5 Instalansi akustik
 - 605.6 Instalansi cahaya / penerangan

- 606 Konstruksi pencegahan
 - 606.1 Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
 - 606.2 Terhadap gempa
 - 606.3 Terhadap angin /udara/panas
 - 606.4 Terhadap kegaduhan
 - 606.5 Terhadap gas/eksplosive
 - 606.6 Terhadap serangga
 - 606.7 Terhadap radiasi atom
 - 606.8 Terhadap kelabilan tanah

607 -

608 -

609 -

610 PENGAIRAN

- 611 Irigasi
 - 611.1 Bangunan waduk
 - 611.11 Bendungan
 - 611.12 Tanggul
 - 611.13 Pelimpahan Banjir
 - 611.14 Menara pengambilan
 - 611.15 Pembangunan dermaga
 - 611.2 Bangunan pengambilan
 - 611.21 B e n d u n g
 - 611.22 Bendung dengan pintu bilas
 - 611.23 Bendung dengan pompa
 - 611.24 Pengambilan bebas
 - 611.25 Pengambilan bebas dengan pompa
 - 611.26 Sumur dengan pompa
 - 611.27 Kantung lumpur
 - 611.28 Silf Ekstrator
 - 611.29 Escope chenel
 - 611.3 Bangunan pembawa
 - 611.31 Saluran
 - 611.311 Saluran induk
 - 611.312 Saluran sekunder
 - 611.313 Suplesi
 - 611.314 Tersier
 - 611.315 Saluran Kwartar
 - 611.316 Saluran pasangan
 - 611.317 Saluran tertutup/terowongan
 - 611.32 Bangunan
 - 611.321 Bangunan bagi
 - 611.322 Bangunan bagi dan sadap
 - 611.323 Bangunan sadap
 - 611.324 Bangunan check
 - 611.325 Bangunan terjun
 - 611.33 Bax Tersier
 - 611.34 Got Miring
 - 611.35 T a l a n g
 - 611.36 Syphon
 - 611.37 Gorong-gorong
 - 611.38 Pelimpahan samping
 - 611.4 Bangunan pembuangan
 - 611.41 Saluran
 - 611.411 Saluran pembuang induk
 - 611.412 Saluran pembuang sekunder
 - 611.413 Saluran pembuang tersier
 - 611.42 Bangunan

- 611.421 Bangunan outlet
- 611.422 Bangunan terjun
- 611.423 Bangunan penahan banjir
- 611.43 Gorong-gorong pembuang
- 611.44 Talang pembuang
- 611.45 Syphon pembuang
- 611.5 Bangunan lainnya
 - 611.51 J a l a n
 - 611.511 Jalan inspeksi
 - 611.512 Jalan logistik
 - 611.52 Jembatan
 - 611.521 Jembatan inspeksi
 - 611.522 Jembatan hewan
 - 611.53 Tangga cuci
 - 611.54 Kubangan kerbau
 - 611.55 Waduk lapangan
 - 611.56 Bangunan penunjang
 - 611.57 Jaringan telepon
 - 611.58 Stasiun Agro
 - 611.59 Bangunan TPI dan Pasar Ikan
- 612 P o l d e r
 - 612.1 Tanggul Keliling
 - 612.11 Tanggul
 - 612.12 Bangunan penutup sungai
 - 612.13 Jembatan
 - 612.2 Bangunan pembawa
 - 612.21 Saluran
 - 612.211 Saluran muka
 - 612.212 Saluran pembawa induk
 - 612.213 Saluran pembawa sekunder
 - 612.214 Saluran stasiun pompa pemasukan
 - 612.22 Bangunan bagi
 - 612.221 Gorong-gorong
 - 612.222 Syphon
 - 612.3 Bangunan pembuang
 - 612.31 Stasiun pompa pembuangan
 - 612.32 Saluran
 - 612.321 Saluran pembawa induk
 - 612.322 Saluran pembawa sekunder
 - 612.33 Pintu air pembuangan
 - 612.34 Gorong-gorong pembuangan
 - 612.35 Syphon pembuangan
 - 612.4 Bangunan lainnya
 - 612.41 Bangunan
 - 612.411 Bangunan Pengukur Air
 - 612.412 Bangunan pengukur curah hujan
 - 612.413 Bangunan gudang stasiun pompa
 - 612.414 Bangunan listrik stasiun pompa
 - 612.42 Rumah petugas eksploitasi
- 613 Pasang surut
 - 613.1 Bangunan pembawa
 - 613.11 Saluran
 - 613.111 Saluran pembawa induk
 - 613.112 Saluran pembawa sekunder
 - 613.113 Saluran pembawa tertier
 - 613.114 Saluran penyimpanan air
 - 613.115 Bangunan pintu pemasukan
 - 613.2 Bangunan pembuang

- 613.21 Saluran
 - 613.211 Saluran pembawa induk
 - 613.212 Saluran pembawa sekunder
 - 613.213 Saluran pembawa tersier
 - 613.214 Saluran penyimpanan air
 - 613.215 Bangunan pintu pembuangan
- 613.3 Bangunan lainnya
 - 613.31 Kolom pasang
 - 613.32 Saluran
 - 613.321 Saluran lalu lintas
 - 613.322 Saluran muka
 - 613.33 Bangunan
 - 613.331 Bangunan penangkis kotoran
 - 613.332 Bangunan pengukur muka air
 - 613.333 Bangunan pengukur curah hujan
 - 613.34 J a l a n
 - 613.35 Jembatan
- 614 Pengendalian sungai
 - 614.1 Bangunan pengaman
 - 614.11 Tanggul banjir
 - 614.12 Pintu pengatur banjir
 - 614.13 Klep pengatur banjir
 - 614.14 Tembok pengaman talut
 - 614.15 K r i b
 - 614.16 Kantung lumpur
 - 614.17 Check Dam
 - 614.18 Syphon
 - 614.2 Saluran pengaman
 - 614.21 Saluran banjir
 - 614.22 Saluran Drainage
 - 614.23 Corepure
 - 614.3 Bagunan lainnya
 - 614.31 Warning system
 - 614.32 Stasiun
 - 614.321 Stasiun pengukur curah hujan
 - 614.322 Stasiun pengukur air
 - 614.323 Stasiun pengukur cuaca
 - 614.324 Stasiun pos penjagaan
- 615 Pengaman pantai
 - 615.1 Tanggul
 - 615.2 Krib
 - 615.3 Bangunan lainnya
- 616 Air Tanah
 - 616.1 Stasiun pompa
 - 616.2 Bangunan pembawa
 - 616.3 Bangunan pembuang
 - 616.4 Bangunan lainnya
- 617 -
- 618 -
- 619 -
- 620 J A L A N**
- 621 Jalan kota
 - 621.1 Daerah penguasaan
 - 621.11 T a n a h
 - 621.12 Tanaman
 - 621.13 Bangunan
 - 621.2 Bangunan sementara

- 621.21 Jalan sementara
- 621.22 Kantor proyek
- 621.23 Gedung proyek
- 621.24 Barak kerja
- 621.25 Laboratorium lapangan
- 621.26 R u m a h
- 621.3 Badan jalan
 - 621.31 Pekerjaan tanah (earth work)
 - 621.32 Stabilisasi
- 621.4 Perkerasan
 - 621.41 Lapisan pondasi bawah
 - 621.42 Lapisan pondasi
 - 621.43 Lapisan permukaan
- 621.5 Drainage
 - 621.51 Parit tanah
 - 621.52 Gorong-gorong (culvert)
- 621.6 Buku trotoir
 - 621.61 T a n a h
 - 621.62 Perkerasan
 - 621.63 Pasangan
- 621.7 M e d i u m
 - 621.71 T a n a h
 - 621.72 Tanaman
 - 621.73 Perkerasan
 - 621.74 Pasangan
- 621.8 Daerah samping
 - 621.81 Tanaman
 - 621.82 P a g a r
- 621.9 Bangunan pelengkap dan pengaman
 - 621.91 Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
 - 621.92 Lampu penerangan
 - 621.93 Lampu pengatur lalu lintas
 - 621.94 Patok-patok KM
 - 621.95 Patok-patok ROW (sempadan)
 - 621.96 Rel pengaman
 - 621.97 P a g a r
 - 621.98 Turap penahan
 - 621.99 Bronjong
- 622 Jalan luar kota
 - 622.1 Daerah penguasaan
 - 622.11 T a n a h
 - 622.12 Tanaman
 - 622.13 Bangunan
 - 622.14 Jalan sementara
 - 622.15 Jembatan sementara
 - 622.16 Kantor/gedung proyek
 - 622.17 Barak kerja
 - 622.18 Laboratorium lapangan
 - 622.19 R u m a h
 - 622.2 Badan jalan
 - 622.21 Pekerjaan tanah (earth work)
 - 622.22 Stabilisasi
 - 622.3 Perkerasan (pavement)
 - 622.31 Lapis pondasi bawah
 - 622.32 Lapis pondasi
 - 622.33 Lapis permukaan
 - 622.4 Drainage

- 622.41 Parit
- 622.42 Gorong-gorong (culvert)
- 622.43 Buku trotoir
- 622.44 T a n a h
- 622.45 Perkerasan
- 622.5 Trotoir
 - 622.51 Tanah
 - 622.52 Perkerasan
- 622.6 M e d i u m
 - 622.61 T a n a h
 - 622.62 Tanaman
 - 622.63 Perkerasan
 - 622.64 Pasangan
- 622.7 Daerah samping
 - 622.71 Tanaman
 - 622.72 P a g a r
- 622.8 Bangunan pelengkap dan pengaman
 - 622.81 Rambu-rambu
 - 622.82 Lampu penerangan
 - 622.83 Lampu pengatur lalu lintas
 - 622.84 Patok-patok KM
 - 622.85 Patok-patok ROW (sempadan)
 - 622.86 Rel pengaman
 - 622.87 P a g a r
 - 622.88 Turap penahan
 - 622.89 Bronjong
- 623 -
- 624 -
- 625 -
- 626 -
- 627 -
- 628 -
- 629 -

630 JEMBATAN

- 631 Jembatan pada jalan kota
 - 631.1 Daerah penguasaan
 - 631.11 T a n a h
 - 631.12 Tanaman
 - 631.13 Bangunan
 - 631.2 Bangunan sementara
 - 631.21 Jalan sementara
 - 631.22 Jembatan sementara
 - 631.23 Kantor Proyek
 - 631.24 Gedung Proyek
 - 631.25 Barak kerja
 - 631.26 Laboratorium lapangan
 - 631.27 Rumah
 - 631.3 Pekerjaan tanah (earth work)
 - 631.31 Galian tanah
 - 631.32 Timbunan tanah
 - 631.4 Pondasi
 - 631.41 Pondasi kepala jembatan
 - 631.42 Pondasi pilar
 - 631.43 Pondasi angker
 - 631.5 Bangunan bawah
 - 631.51 Kepala jembatan
 - 631.52 P i l a r
 - 631.53 P i l o o n

- 631.54 Landasan
- 631.6 Bangunan
 - 631.61 Gelagar
 - 631.62 Lantai
 - 631.63 Perkerasan
 - 631.64 Jalan orang/trotoir
 - 631.65 Sandaran
 - 631.66 Talang air
- 631.7 Bangunan pengaman
 - 631.71 Turap/penahan
 - 631.72 Bronjong
 - 631.73 Strek Dam
 - 631.74 Kist Dam
 - 631.75 Coupute
 - 631.76 Krip
- 631.8 Bangunan pelengkap
 - 631.81 Rambu-rambu/Tanda lalu lintas
 - 631.82 Patok pengaman
 - 631.83 Patok ROW (sempadan)
- 631.9 Oprit
 - 631.91 Badan
 - 631.92 Perkerasan
 - 631.93 Drainage
 - 631.94 B a k u
 - 631.95 Medium
- 632 Jembatan pada luar kota
 - 632.1 Daerah penguasaan
 - 632.11 Tanah
 - 632.12 Tanaman
 - 632.13 Bangunan
 - 632.2 Bangunan sementara
 - 632.21 Jalan sementara
 - 632.22 Jembatan sementara
 - 632.23 Kantor Proyek
 - 632.24 Gedung proyek
 - 632.25 Barak kerja
 - 632.26 Laboratorium lapangan
 - 632.27 R u m a h
 - 632.3 Pekerjaan tanah (earth work)
 - 632.31 Galian tanah
 - 632.32 Timbunan tanah
 - 632.4 Pondasi
 - 632.41 Pondasi kepala jembatan
 - 632.42 Pondasi pilar
 - 632.43 Pondasi angker
 - 632.5 Bangunan bawah
 - 632.51 Kepala jembatan
 - 632.52 Pilar
 - 632.53 Piloon
 - 632.54 Landasan
 - 632.6 Bangunan atas
 - 632.61 Gelagar
 - 632.62 Lantai
 - 632.63 Perkerasan
 - 632.64 Jalan orang/trotoir
 - 632.65 Sandaran
 - 632.66 Talang air
 - 632.7 Bangunan pengaman

- 632.71 Turap/penahan
- 632.72 Bronjong
- 632.73 Stek Dam
- 632.74 Kist Dam
- 632.75 Coupute
- 632.76 Krip
- 632.8 Bangunan pelengkap
 - 632.81 Rambu-rambu/Tanda-tanda lalulintas
 - 632.82 Patok pengaman
 - 632.83 Patok ROW (sempadan)
- 632.9 Oprit
 - 632.91 B a d a n
 - 632.92 Perkerasan
 - 632.93 Drainage
 - 632.94 B a k u
 - 632.95 Medium
- 633 -
- 634 -
- 635 -
- 636 -
- 637 -
- 638 -
- 639 -
- 640 BANGUNAN**
- 641 Bangunan pemerintah
 - 641.1 Gedung Pengadilan
 - 641.2 Rumah pejabat negara
 - 641.3 Gedung DPR
 - 641.4 Gedung Balai Kota
 - 641.41 Gardu Distribusi
 - 641.5 Penjara
 - 641.6 Perkantoran
- 642 Bangunan Pendidikan
 - 642.1 Taman Kanak-kanak
 - 642.2 SD & Sekolah Menengah
 - 642.3 Perguruan Tinggi
- 643 Bangunan rekreasi
 - 643.1 Bangunan olah raga
 - 643.2 Gedung kesenian
 - 643.3 Gedung pemancar
- 644 Bangunan Perdagangan
 - 644.1 Pusat perbelanjaan
 - 644.2 Gedung Perdagangan
 - 644.3 B a n k
 - 644.4 Perkantoran
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
 - 645.1 Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
 - 645.2 Gedung Parkir
 - 645.3 Rumah Sakit
 - 645.4 Gedung Telkom
 - 645.5 Terminal Angkutan Udara
 - 645.6 Terminal Angkutan Air
 - 645.7 Terminal Angkutan Darat
 - 645.8 Bangunan keagamaan
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
 - 646.1 Monumen
 - 646.2 Candi
 - 646.3 Kraton

- 646.4 Rumah tradisional
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan tempat tinggal
 - 648.1 Rumah perkantoran
 - 648.11 Inti/Sederhana
 - 648.12 Sedang/Mewah
 - 648.2 Rumah Pedesaan
 - 648.21 Rumah contoh
 - 648.3 Real estate
- 649 Elemen Bangunan
 - 649.1 Pondasi
 - 649.11 Di atas tiang
 - 649.2 Dinding
 - 649.21 Penahan beban
 - 649.22 Tidak menahan beban
 - 649.3 A t a p
 - 649.4 Lantai/Langit-langit
 - 649.41 Suspendend
 - 649.42 Solit
 - 649.5 Pintu/jendela
 - 649.51 Pintu hermonik
 - 649.52 Pintu biasa
 - 649.53 Pintu sorong
 - 649.54 Jendela kayu
 - 649.55 Jendela sorong
 - 649.56 Jendela vertikal

650 TATA RUANG KOTA

- 651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan
 - 651.1 Daerah pusat perbelanjaan
 - 651.2 Daerah perkotaan
- 652 Daerah pemerintahan
- 653 Daerah Perumahan (Site & Servey)
 - 653.1 Kepadatan rendah (Low Density)
 - 653.2 Kepadatan Tinggi (High Density)
- 654 Daerah Industri
 - 654.1 Industri Berat
 - 654.2 Industri ringan
 - 654.3 Industri rumah (home industri)
- 655 Daerah rekreasi (open spece)
 - 655.1 Publik Garden
 - 655.2 Sport &Playing Fields
 - 655.3 Open space
- 656 Transportasi (tata letak)
 - 656.1 Jaringan jalan
 - 656.11 Penerangan jalan
 - 656.2 Jaringan kereta api
 - 656.3 Jaringan sungai
- 657 Assineering
 - 657.1 Saluran pengumpulan
 - 657.2 Instansi pengolahan
 - 657.21 Bangunan
 - 657.22 Bangunan penyaring
 - 657.23 Bangunan penghancur kotoran
 - 657.24 Bangunan Pengendapan
 - 657.25 Bangunan pengering lumpur
 - 657.26 Unit Disinfektan
 - 657.27 Unit perpompaan

- 658 Kesehatan lingkungan
 - 658.1 Persampahan
 - 658.11 Bangunan pengumpul
 - 658.12 Bangunan pemusnahan
 - 658.2 Pengotoran udara
 - 658.3 Pengotoran air
 - 658.31 Air Buangan Industri
 - 658.4 Kegaduhan
 - 658.5 Kebersihan kota

659 -

660 TATA LINGKUNGAN

- 660.1 Lingkungan hidup
- 660.2 Kebersihan lingkungan
- 660.3 Pencermaran
 - 660.31 Pencemaran air
 - 660.32 Pencemaran udara
- 661 Daerah hutan
- 662 Daerah pertanian/Perkebunan
- 663 Daerah pemukiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transportasi
 - 665.1 Jaringan jalan
 - 665.2 Jaringan kereta api
 - 665.3 Jaringan sungai

666 -

667 -

668 -

669 -

670 KETENAGAAN

- 671 Listrik
 - 671.1 Kelistrikan
 - 671.11 Kelistrikan PLN
 - 671.12 Kelistrikan non PLN
 - 671.2 Pembangkit tenaga listrik
 - 671.21 PLTA (Air)
 - 671.22 PLTD (Diesel)
 - 671.23 PLTG (Gas)
 - 671.24 PLTM (Matahari)
 - 671.25 PLTN (Nuklir)
 - 671.26 PLTN (Panas Bumi)
 - 671.27 PLTU (Uap)
 - 671.3 Transmisi tenaga listrik
 - 671.31 Gardu induk/Gardu penghubung/ Gardu Trafo
 - 671.32 Saluran Udara Tenaga Tinggi
 - 671.33 Kabel bawah tanah
 - 671.4 Distribusi tenaga listrik
 - 671.41 Gardu distribusi
 - 671.42 Tegangan menengah
 - 671.43 Tegangan rendah
 - 671.44 Jaringan bawah tanah
 - 671.5 Pengusahaan listrik
 - 671.51 Sambungan listrik
 - 671.52 Penjualan tenaga listrik
 - 671.53 Tarif listrik
- 672 Tenaga Air
- 673 Tenaga minyak

- 674 Tenaga Gas
- 675 Tenaga Matahari
- 676 Tenaga Nuklir
- 677 Tenaga Panas Bumi
- 678 Tenaga Uap
- 679 Tenaga Lainnya

680 PERALATAN

- 681 -
- 682 -
- 683 -
- 684 -
- 685 -
- 686 -
- 687 -
- 688 -
- 689 -

690 AIR MINUM

- 691 Intako
 - 691.1 Bromcaptering
 - 691.2 Sumur
 - 691.3 Bendungan
 - 691.4 Saringan (Screen)
 - 691.5 Pintu Air
 - 691.6 Saluran pembawa
 - 691.7 Alat ukur
 - 691.8 Perpompaan
- 692 Transmisi air baku
 - 692.1 Perpipaan
 - 692.2 Katup udara (Air Rolief)
 - 692.3 Tutup Penguras (Blow off)
 - 692.4 Bak pelepas tekanan
 - 692.5 Jembatan pipa
 - 692.6 Syphon
- 693 Instalasi pengelolaan
 - 693.1 Bangunan ukur
 - 693.2 Bangunan aerasi
 - 693.3 Bangunan pengendapan
 - 693.4 Bangunan pembubuh bahan kimia
 - 693.5 Bangunan pengaduk
 - 693.6 Bangunan saringan
 - 693.7 Perpompaan
 - 693.8 Clear Hell
- 694 Distribusi
 - 694.1 Reservoir Menara bawah tanah
 - 694.11 Menara
 - 694.12 Reservoir di bawah tanah
 - 694.2 Perpipaan
 - 694.3 Perpompaan
 - 694.4 Jembatan pipa
 - 694.5 Syphon
 - 694.6 Hydran
 - 694.61 Hydran umum
 - 694.62 Hydran kebakaran
 - 694.7 Katup
 - 694.71 Katup udara (air relief)
 - 694.72 Katup pelepas (blow off)
 - 694.8 Bak pelepas tekanan (pressuer reducing valve)

- 695 -
- 696 -
- 697 -
- 698 -
- 699 -

700 PENGAWASAN

- 701 Pengawasan urusan dalam meliputi pengawasan sarana dan fasilitas kantor
- 702 Pengawasan peralatan
- 703 Pengawassan kekayaan
- 704 Pengawasan perpustakaan dan dokumen
- 705 Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek
- 706 Pengawasan organisasi dan tata laksana
- 707 Pengawasan penelitian/riset
- 708 Pengawasan konferensi/Rapat dinas
- 709 Pengawasan perjalan dinas pejabat/PNS

710 BIDANG PEMERINTAHAN

- 711 Pengawasan pemerintahan pusat
- 712 Pengawasan pemerintah propinsi
- 713 Pengawasan Pemda Kabupaten/Kota
- 714 Pengawasan pemerintah desa
- 715 Pengawasan DPR/MPR/DPD
- 716 Pengawasan DPRD Propinsi
- 717 Pengawasan DPRD Kabupaten/Kota
- 718 Pengawasan hukum/Konstitusi/Peraturan lain
- 719 Pengawasan hubungan luar negeri

720 BIDANG POLITIK

- 721 Pengawasan partai
 - 721.1 Keanggotaan
 - 721.2 Pendirian/Pembubaran
 - 721.3 Pelanggaran pemasangan atribut partai
- 722 Pengawasan organisasi kemasyarakatan/agama/kepercayaan kepada Tuhan YME
- 723 Pengawasan organisasi profesi dan fungsional
- 724 Pengawasan organisasi kepemudaan/olah raga
- 725 Pengawasan buruh tani, nelayan
- 726 Pengawasan organisasi wanita
- 727 Pengawasan pemilu
 - 727.1 Pemilu legislatif dan DPD
 - 727.2 Pemilu eksekutif/presiden
 - 727.3 Pemilu Gubernur
 - 727.4 Pemilu Bupati/Walikota
- 728 Pengawasan keanggotaan PNS dalam partai
- 729 Pengawasan pendanaan partai

730 BIDANG KEAMANAN /KETERTIBAN

- 731 Pengawasan pertahanan
- 732 Pengawasan keamanan
- 733 Pengawasan penegak hukum
- 734 Pengawasan perlindungan masyarakat
- 735 Pengawasan penyimpangan pejabat/PNS
 - 735.1 Persengketaan PNS
 - 735.2 Pembunuhan
 - 735.3 Penganiyaan/perampokan/pencurian
 - 735.4 Pemalsuan
 - 735.5 Tindakan asusila/pelecehan seksual/KDRT
 - 735.6 Korupsi/penyalahgunaan jabatan struktural (lihat 356)

- 736 Pengawasan bencana alam
- 737 Pengawasan SAR/Bencana
- 738 Pengawasan keamanan aparat/pejabat
- 739 Pengawasan lingkungan hidup
- 740 BIDANG KESRA**
- 741 Pengawasan pembangunan desa
- 742 Pengawasan penyelenggaraan pendidikan
 - 742.1 Kesejahteraan guru
 - 742.2 Fasilitas/Sarana
 - 742.3 Mutu pendidikan
- 743 Pengawasan kebudayaan
 - 743.1 Kebudayaan daerah/nasional
 - 743.2 Kebudayaan asing
- 744 Pengawasan kesehatan/makanan/obat
- 745 Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
- 746 Pengawasan kesejahteraan sosial
- 747 Pengawasan kependudukan/migrasi/urbanisasi
- 748 Pengawasan kehumasan/media masa
- 749 Pengawasan bantuan/subsidi masyarakat
- 750 BIDANG PEREKONOMIAN**
- 751 Pengawasan perdagangan
- 752 Pengawasan pertanian/perkebunan
- 753 Pengawasan perindustrian
- 754 Pengawasan pertambangan/kelautan
- 755 Pengawasan perhubungan
- 756 Pengawasan tenaga kerja
- 757 Pengawasan PMDN/PMA
- 758 Pengawasan perbankan/moneter
- 759 Pengawasan pertanahan/BPN
- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM**
- 761 Pengawasan pengairan
- 762 Pengawasan jalan
- 763 Pengawasan jembatan
- 764 Pengawasan bangunan
- 765 Pengawasan tata ruang kota
- 766 pengawasan tata lingkungan
- 767 Pengawasan ketenagaan
- 768 Pengawasan peralatan
- 769 Pengawasan Air minum
- 770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK**
- 771 Pengawasan gubernur/bupati/walikota
- 772 Serah terima jabatan publik
- 773 Laporan pertanggung jawaban pusat
- 774 Laporan pertanggung jawaban gubernur
- 775 Laporan pertanggung jawaban bupati/walikota
- 776 Penolakan LPJ
- 777 Penyimpangan pejabat publik
- 778 Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
- 779 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- 780 BIDANG KEPEGAWAIAN**
- 781 Pengawasan pengadaan PNS
- 782 Pengawasan pengangkatan dan mutasi
- 783 Pengawasan kedudukan/jabatan
- 784 Pengawasan Kesejahteraan PNS
- 785 Pengawasan cuti
- 786 Pengawasan Penilaian dan disiplin PNS

- 787 Pengawasan pemberhentian PNS
- 788 Pengawasan Tata usaha /administrasi PNS
- 789 Pengawasan pendidikan PNS

790 BIDANG KEUANGAN

- 791 Pengawasan anggaran/APBD
- 792 Pengawasan otorisasi
- 793 Pengawasan verifikasi
- 794 Pengawasan pembukuan
- 795 Pengawasan perbendaharaan
- 796 Pengawasan pembinaan perbendaharaan
- 797 Pengawasan pendapatan /penerimaan pajak
- 798 Pengawasan keuangan pendidikan PNS
- 799 Pengawasan bendaharawan /pemegang kas

800 KEPEGAWAIAN

Klasifikasikan disini: Kebijakan Kepegawaian

- 800.1 Perencanaan
- 800.2 Penelitian
 - 800.21 Pengaduan
 - 800.22 T e a m
 - 800.23 Statistik
 - 800.24 Peraturan perundang-undangan

810 PENGADAAN

Meliputi lamaran,pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai

- 811 Lamaran
 - 811.1 Testing
 - 811.2 Screening
 - 811.3 Panggilan
- 812 Pengujian kesehatan
- 813 Pengangkatan calon pegawai
 - 813.1 Pengangkatan calon pegawai golongan I
 - 813.2 Pengangkatan calon pegawai golongan II
 - 813.3 Penganangkatan calon pegawai golongan III
 - 813.4 Pengangkatan calon pegawai golongan IV
 - 813.5 Pengangkatan calon guru
- 814 Pengangkatan tenaga harian lepas
 - 814.1 Pengangkatan tenaga bulanan
 - 814.2 Pengangkatan tenaga harian
- 815 Pengangkatan tenaga asing
- 816 Pengangkatan tenaga kontrak
- 817 -
- 818 -
- 819 -

820 MUTASI

- 820.1 Golongan I
- 820.2 Golongan II
- 820.3 Golongan III
- 820.4 Golongan IV
- 820.5 Fungsional
- 821 Pengangkatan
 - 821.1 Pengangkatan menjadi PNS tetap
 - 821.11 Pengangkatan menjadi PNS gol. I
 - 821.12 Pengangkatan menjadi PNS gol. II
 - 821.13 Pengangkatan menjadi PNS gol. III
 - 821.14 Pengangkatan menjadi PNS gol. IV

- 821.2 Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan
 - 821.21 Sekjen/Dirjen/Kaban/Sekda/Sekdan/ Asekda
 - 821.22 Kepala Biro/ Direktur/ Inspektur/ Kepala Pusat/ Sekretaris/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor
 - 821.23 Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/ Kepala Bidang/ Inspektur pembantu
 - 821.24 Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/ Pemeriksa/ UPTD/ UPPD
 - 821.25 -
 - 821.26 -
 - 821.27 C a m a t
 - 821.28 Lurah
 - 821.29 Jabatan lainnya
- 822 Kenaikan gaji berkala
 - 822.1 Pegawai golongan I
 - 822.2 Pegawai golongan II
 - 822.3 Pegawai golongan III
 - 822.4 Pegawai golongan IV
- 823 Kenaikan pangkat/Pengangkatan
 - 823.1 Pegawai Golongan I
 - 823.2 Pegawai golongan II
 - 823.3 Pegawai golongan III
 - 823.4 Pegawai golongan IV
- 824 Pemindehan/Pelimpahan/Perbantuan
 - 824.1 Pegawai golongan I
 - 824.2 Pegawai golongan II
 - 824.3 Pegawai golongan III
 - 824.4 Pegawai golongan IV
 - 824.5 Lolos butuh
- 825 Detasering dan penempatan kembali
- 826 Penunjukan tugas belajar
 - 826.1 Dalam negeri
 - 826.2 Luar negeri
 - 826.3 Tunjangan belajar
 - 826.4 Penempatan kembali
 - 826.5 Ijin belajar
- 827 Wajib militer
- 828 Mutasi pegawai instansi lain
- 829 -

830 KEDUDUKAN

- 831 Perhitungan masa kerja
- 832 Penyesuaian pangkat/gaji
 - 832.1 Pegawai golongan I
 - 832.2 Pegawai golongan II
 - 832.3 Pegawai golongan III
 - 832.4 Pegawai golongan IV
- 833 Penghargaan ijasah
- 834 Penghargaan teknologi tepat guna
- 835 Penghargaan humas
- 836 Penghargaan lingkungan hidup
- 837 Penghargaan kemanusiaan
- 838 Penghargaan kewirausahaan
- 839 Penghargaan kesenian

840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

- 840.1 Meliputi tunjangan
- 841 Tunjangan
 - 841.1 Jabatan
 - 841.2 Kehormatan
 - 841.3 Kematian
 - 841.4 Tunjangan Hari Raya
 - 841.5 Perjalanan dinas tetap/cuti/pindah
 - 841.6 Keluarga
 - 841.7 Pangan, uang makan
- 842 Dana
 - 842.1 Taspen
 - 842.2 Kesehatan
 - 842.3 Asuransi
- 843 Perawatan kesehatan
 - 843.1 Poliklinik
 - 843.2 Perawatan dokter
 - 843.3 Obat-obatan
 - 843.4 Keluarga berencana
- 844 Koperasi/distribusi
 - 844.1 Distribusi pangan
 - 844.2 Distribusi sandang
 - 844.3 Distribusi lainnya
- 845 Perumahan/tanah
 - 845.1 Perumahan pegawai
 - 845.2 Tanah kapling
 - 845.3 Losmen/Hotel
- 846 Bantuan sosial
 - 846.1 Bantuan kebakaran
 - 846.2 Bantuan banjir
- 847 Rekreasi
- 848 Dispensasi
- 849 -

850 C U T I

- 851 Cuti tahunan
- 852 Cuti besar
- 853 Cuti sakit
- 854 Cuti hamil
- 855 Cuti naik haji
- 856 Cuti di luar tanggungan negara
- 857 Cuti alasan lain
- 858 -
- 859 -

860 PENILAIAN

- 861 Penghargaan
 - 861.1 Bintang/Satyalencana
 - 861.2 Kenaikan pangkat anumerta
 - 861.3 Kenaikan gaji istimewa
 - 861.4 Hadiah berupa pangkat
 - 861.5 Pegawai teladan
- 862 Hukuman
 - 862.1 Tegoran/peringatan
 - 862.2 Penundaan kenaikan gaji
 - 862.3 Penurunan pangkat
 - 862.4 Pemindahan
- 863 Konduite

- 864 Ujian dinas
 - 864.1 Tingkat I
 - 864.2 Tingkat II
 - 864.3 Tingkat III
- 865 Penilaian kehidupan pegawai negeri
- 866 Rehabilitasi
- 867 -
- 868 -
- 869 -

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

- 871 Formasi
- 872 Bezetting
- 873 Registrasi
 - 873.1 NIP
 - 873.2 KARPEG
 - 873.3 Legitimasi/Tanda Pengenal
 - 873.4 Daftar Keluarga
 - 873.5 KARSU/KARIS
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
 - 874.1 Tanggal Lahir
 - 874.2 Penggantian Nama
 - 874.3 Kepartaian / Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Kepegawaian
 - 875.1 Pelimpahan wewenang
 - 875.2 Spesimen tanda tangan
- 876 Penggajian
 - 876.1 SKPP
- 877 Sumpah/janji
- 878 Korps Kepegawaian
- 879 -

880 PEMBERHENTIAN

- 881 Permintaan sendiri
- 882 Dengan hak pensiun
 - 882.1 Pemberhentian dengan hak pensiun Peg.Neg.Gol.I
 - 882.2 Pemberhentian dengan hak pensiun Peg.Neg. Gol.II
 - 882.3 Pemberhentian dengan hak pensiun Peg.Neg.Gol.III
 - 882.4 Pemberhentian dengan hak pensiun peg.neg.Gol.IV
 - 882.5 Pensiun janda / duda
 - 882.6 Pensiun yatim piatu
 - 882.7 Uang muka pension
- 883 Karena meninggal
 - 883.1 Karena meninggal dalam tugas
- 884 Alasan lain
- 885 Uang pesangon
- 886 Uang tunggu
- 887 Sementara waktu
- 888 Tidak dengan hormat
- 889 -

890 PENDIDIKAN PEGAWAI

- 891 Perencanaan
- 892 Pendidikan Reguler
 - 892.1 I P D N
 - 892.2 Akademi
 - 892.3 Kursus-kursus reguler
- 893 Pendidikan Non Reguler
 - 893.1 Diklat Pimpinan
 - 893.11 Diklat Pim. I

- 893.12 Diklat Pim. II
- 893.13 Diklat Pim. III
- 893.14 Diklat Pim. IV
- 893.2 Diklat Fungsional
- 893.3 Kursus-kursus/Penataran
- 894 Pendidikan ke luar negeri
- 895 Metode
 - 895.1 Kuliah
 - 895.2 Ceramah, symposium
 - 895.3 Diskusi
 - 895.4 Kuliah lapangan, Widya wisata, KKN
 - 895.5 Kurikulum
 - 895.6 Karya tulis
- 896 Tenaga Pengajar
- 897 Akademi pendidikan
 - 897.1 Tahun pelajaran
 - 897.2 Persyaratan, meliputi pendaftaran, testing, ujian
- 898 Fasilitas
 - 898.1 Tunjangan belajar
 - 898.2 Asrama
 - 898.3 Uang makan
 - 898.4 Uang transport
 - 898.5 Uang buku
- 899 Sarana
 - 899.1 Buku
 - 899.2 Gedung

900 K E U A N G A N

- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD
- 904 -
- 905 -
- 906 -
- 907 -
- 908 -
- 909 -

910 ANGGARAN

- 911 Belanja Tidak Langsung
- 912 Belanja Langsung
- 913 Anggaran Definitif
- 914 Anggaran Perubahan
- 915 DPA / DPPA
- 916 RKA
- 917 -
- 918 -
- 919 -

920 OTORISASI

- 921 SPD Belanja Daerah
- 922 -
- 923 S I A P
 - 923.1 SIAPDA
- 924 Ralat SPD
- 925 -
- 926 -
- 927 -
- 928 -
- 929 -

930 VERIFIKASI

- 931 S P P
- 932 S P M
- 933 SP2D
- 934 S P J
- 935 -
- 936 Nota Pemeriksaan
- 937 SP Pemindah Bukuan
- 938 -
- 939 -

940 PEMBUKUAN

- 941 Penyusunan Perhitungan Anggaran
- 942 Permintaan Dana Anggaran laporan Fisik Pembangunan
- 943 Penyusunan Neraca
- 944 Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah
- 945 S A P (Sistem Akuntansi Pemerintahan)
- 946 -
- 947 -
- 948 -
- 949 -

950 PERBENDAHARAAN

- 951 Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
- 952 Tuntutan Perbendaharaan
- 953 Penghapusan Kekayaan Negara
- 954 Pengangkatan/Pergantian Bendaharawan
- 955 Speciment tandatangan
- 956 Surat Tangguhan Piutang
- 957 -
- 958 -
- 959 -

960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN

- 961 Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas
- 962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
- 963 Laporan Keuangan Bendaharawan
- 964 -
- 965 -
- 966 -
- 967 -
- 968 -
- 969 -

970 PENDAPATAN

- 971 Perimbangan Keuangan
 - 971.1 Bagi Hasil Pajak
 - 971.11 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 971.12 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(PHBTB)
 - 971.13 Pajak Penghasilan Orang Pribadi(PPH Pasal 21)
 - 971.2 Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 971.21 Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah
 - 971.22 Provisi Sumber Daya Hutan
 - 971.23 Sumber Daya Alam/Migas
 - 971.24 Iuran Eksplorasi / Landrent
- 972 Subsidi

- 973 Pajak
 - 973.1 Pajak kendaraan bermotor
 - 973.2 Pajak kendaraan diatas air
 - 973.3 Bea balik nama kendaraan bermotor
 - 973.4 Bea balik nama kendaraan diatas air
 - 973.5 Pajak bahan kendaraan bermotor
 - 973.6 Pajak pengambilan dan pemanfaatan ABT
 - 973.7 Pajak pengambilan dan pemanfaatan AP
 - 973.8 Pajak galian golongan C
 - 973.9 Pajak penerangan jalan (PPJ PLN/non PLN)
- 974 Retribusi
 - 974.1 Retribusi pelayanan kesehatan
 - 974.2 Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - 974.3 Retribusi tempat pelelangan ikan
 - 974.4 Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa
 - 974.5 Retribusi penjualan produksi usaha daerah
 - 974.6 Retribusi hasil hutan
 - 974.61 Pengendalian kayu lintas kabupaten / kota
 - 974.62 Ijin pemanfaatan flora dan fauna
 - 974.63 Tempat pelelangan hasil hutan
 - 974.7 Retribusi ijin pengambilan dan pemanfaatan ABT /AP
 - 974.8 Retribusi bidang metrologi
 - 974.9 Retribusi penyelenggaraan perhubungan
 - 974.91 Ijin Trayek
 - 974.92 Penyelenggaraan Telkom
 - 974.93 Dispensasi kelebihan muatan
- 975 B e a
- 976 Cukai
- 977 Pungutan
- 978 Bantuan
 - 978.1 Bantuan Presiden
 - 978.2 Bantuan Menteri
 - 978.3 Bantuan Gubernur
 - 978.4 Bantuan Bupati
 - 978.5 Bantuan Lainnya
- 979 Pendapatan lainnya
 - 979.1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
 - 979.11 Pelepasan Hak Atas Tanah
 - 979.12 Penjualan Rumah jabatan/ Rumah Dinas
 - 979.13 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
 - 979.14 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
 - 979.15 Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
 - 979.16 Penjualan Drum Bekas
 - 979.17 Penjualan hasil penebangan pohon
 - 979.2 Penerimaan Jasa Giro
 - 979.21 Jasa Giro Kas Daerah
 - 979.22 Jasa Giro Pemegang Kas
 - 979.23 Jasa Giro Khusus
 - 979.3 Penerimaan Bunga Bank
 - 979.31 Bunga Deposito
 - 979.32 Bunga Tabungan
 - 979.4 Penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR)
 - 979.41 Sumbangan pihak ketiga
 - 979.42 Sumbangan Pihak ke tiga kendaraan (dealer)
 - 979.43 Sumbangan Pihak ke tiga Kayu

- 979.5 Penerimaan lain-lain
 - 979.51 Penerimaan Kembali Kredit BKK
 - 979.52 Ternak Tidak Layak Bibit
 - 979.53 Sewa Internet
 - 979.54 Penerimaan dari Dana Bergulir/ Revolving
 - 979.55 Kerjasama dengan BUMIDA
 - 979.56 Penerimaan DUKS
 - 979.57 Tempat Rekreasi Nusakambangan
 - 979.58 Setoran TP-TGR
 - 979.59 Penerimaan lainnya dari setda / dinas-dinas

980 PENGELUARAN

- 981 -
- 982 -
- 983 -
- 984 -
- 985 -
- 986 -
- 987 -
- 988 -
- 989 -

990 BENDAHARAWAN

- 991 SKPP
- 992 Tegoran SPJ
- 993 -
- 994 -
- 995 -
- 996 -
- 997 -
- 998 -
- 999 -

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

FARID MA'RUF